

PETUNJUK OPERASIONAL DAN KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2023



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
JL NIPAH NO 51 PADANG
TELEPON 0751-31961, FAX 0751-31841**

**PADANG, OKTOBER 2022
NOMOR**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL DAN KERANGKA ACUAN KERJA

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
 - A. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
 - 1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
 - 2. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
 - B. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**
 - 1. PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
 - 2. PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
 - 3. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD
 - C. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**
 - 1. PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD
 - 2. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
 - 3. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
 - D. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**
 - 1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - 2. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - 3. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - E. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**
 - 1. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
 - 2. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
 - 3. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
 - 4. PENYEDIAAN BAHAN CETAKAN DAN PENGGANDAAN

5. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
- F. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 1. PENGADAAN MEDEL
 2. PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
- G. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 1. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
 2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
 3. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
 4. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
- H. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 1. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
 2. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
 3. PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
 4. PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
 5. PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- A. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
 1. PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH
 2. PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
 3. REVIEW LAPORAN KINERJA
 4. REVIEW LAPORAN KEUANGAN
 5. PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS KABUPATEN/KOTA
 6. KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL
 7. MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP
- B. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
 1. PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
 2. PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

III. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN

1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN
2. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN

B. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

1. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI
3. KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
4. PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, M.Si, CFrA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

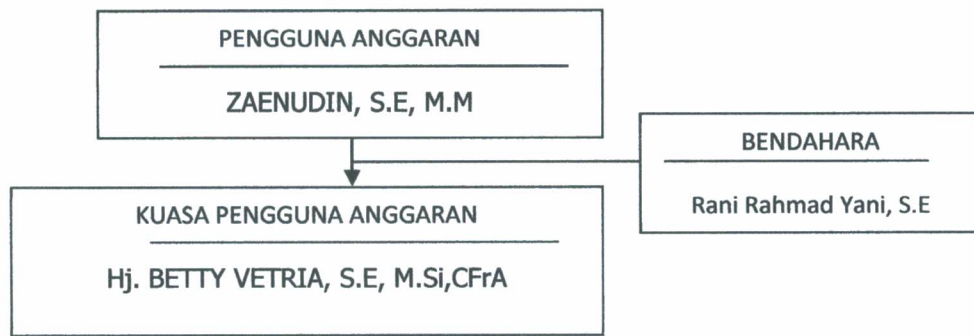
E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp4.441.000,-

II. SASARAN KEGIATAN :

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk melakukan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 4.441.000	
Keluaran	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun				2 dokumen	
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				85 %	
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.441.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.441.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.441.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.441.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.441.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 444.600
	[#]					Rp. 444.600
	[-]					
	box file besi Spesifikasi : 1 susun	5 Buah	Pcs	67.000	0	Rp. 335.000
	pena Spesifikasi : diamond	2 Kotak	Kotak	27.800	0	Rp. 55.600
	Pensil Spesifikasi : mp-19	12 Pcs	Pcs	4.500	0	Rp. 54.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 983.700
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 983.700
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	9 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 522.000

[illegible]

KERANGKA ACUAN KERJA

KOORDINASI dan PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA dan IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah maka diperlukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Tersusunnya dokumen Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023 demi terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dan koordinasi penyusunan dokumen capaian kinerja	Januari s/d Desember
2.	Belanja barang untuk pembuatan dokumen capaian kinerja	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Dokumen capaian kinerja yang tersusun.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp4.441.000,-melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HJ. BETTY VETRIA', written over a horizontal line.

Hj. BETTY VETRIA, SE, M.Si, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

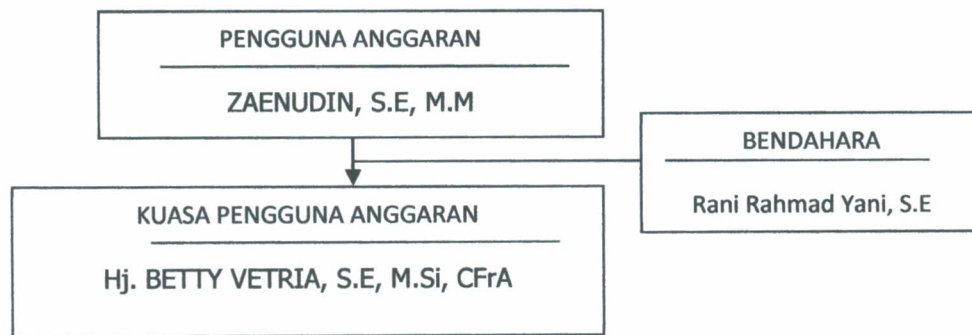
E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp15.010.000,-

II. SASARAN :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah demi terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 15.010.000	
Keluaran	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				7 dokumen	
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				85 %	
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.010.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.010.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.210.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.210.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 444.600
	[#]					Rp. 444.600
	[-]					
	box file besi Spesifikasi : 1 susun	5 Buah	Pcs	67.000	0	Rp. 335.000
	pena Spesifikasi : diamond	2 Kotak	Kotak	27.800	0	Rp. 55.600
	Pensil Spesifikasi : mp-19	12 Pcs	Pcs	4.500	0	Rp. 54.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.081.700
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.081.700
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : a3 70 gr	1 Rim	Rim	98.000	0	Rp. 98.000

[illegible]

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah maka diperlukan proses penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023.

B. TUJUAN

Tersusunnya dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023 demi terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	Januari s/d Desember
2.	Belanja barang untuk pembuatan dokumen perencanaan	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

1. Dokumen perencanaan perangkat daerah (RKT, PK, PK Perubahan, Renstra dan Renja) yang disusun.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp15.010.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbang
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

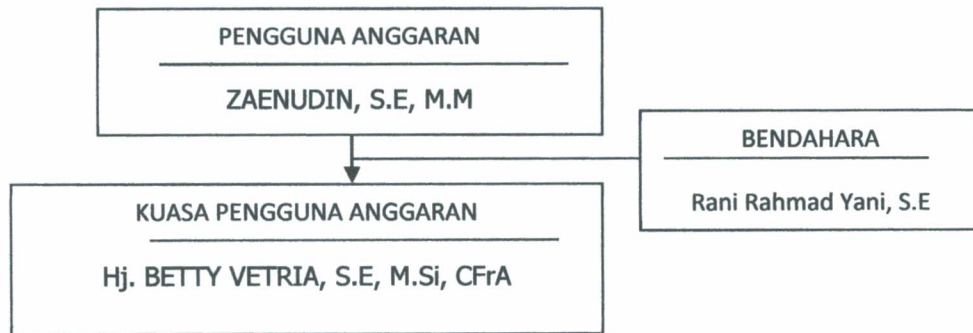
E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp14.711.925.660,-

II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN merupakan proses kegiatan yang ditujukan tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan terhadap 110 ASN perangkat daerah demi terlaksananya tertib administrasi keuangan.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 14.711.925.660
Keluaran	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya					110 orang
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 14.711.925.660
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.711.925.660
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 14.711.925.660
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 7.360.180.255
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 5.233.234.208
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 5.233.234.208
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.233.234.208
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		5.233.234.208	0	Rp. 5.233.234.208
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 526.847.007
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 526.847.007
	[#] Tunjangan keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 526.847.007
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		526.847.007	0	Rp. 526.847.007
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 181.430.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 181.430.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 181.430.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		181.430.000	0	Rp. 181.430.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 671.556.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 671.556.000
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 671.556.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		671.556.000	0	Rp. 671.556.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 93.316.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 93.316.000
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 93.316.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		93.316.000	0	Rp. 93.316.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 304.493.511
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 304.493.511
	[#] Tunjangan beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 304.493.511
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		304.493.511	0	Rp. 304.493.511
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 46.070.031
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 46.070.031
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.070.031
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		46.070.031	0	Rp. 46.070.031
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 69.330
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 69.330
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 69.330
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		69.330	0	Rp. 69.330
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 230.066.528
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 230.066.528
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 230.066.528
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		230.066.528	0	Rp. 230.066.528
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 10.774.426
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 10.774.426

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.774.426
	[-]					
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		10.774.426	0	Rp. 10.774.426
5.1.01.01.11	Belanja iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 32.323.214
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 32.323.214
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.323.214
	[-]					
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		32.323.214	0	Rp. 32.323.214
5.1.01.01.12	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 30.000.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 30.000.000
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000
	[-]					
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		30.000.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 7.351.745.405
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 7.351.745.405
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 7.351.745.405
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.351.745.405
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		7.351.745.405	0	Rp. 7.351.745.405
Grand Total :						Rp. 14.711.925.660

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan tertibnya administrasi keuangan maka diperlukan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Tersedianya gaji dan tunjangan 110 orang ASN Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja gaji dan tunjangan ASN (110 orang)	Januari s/d Desember
2.	Belanja tambahan penghasilan ASN (110 orang)	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Gaji dan tunjangan 110 orang ASN Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibayarkan tahun 2023.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp14.711. 925.660,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan Sub Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

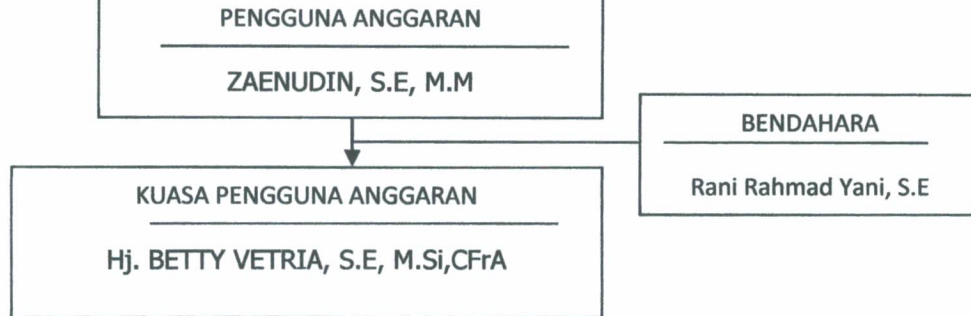
Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp141.510.000,-

II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN merupakan proses kegiatan yang ditujukan tersedianya pembayaran jasa administrasi keuangan perangkat daerah terhadap 8 orang ASN Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat demi terlaksananya tertib administrasi keuangan.



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 141.510.000
Keluaran	Jumlah ASN yang mendapatkan honor					8 orang
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 141.510.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 141.510.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 141.510.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 141.510.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 141.510.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 133.350.000
	[#]					Rp. 34.080.000
	[-]					
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp. 15.840.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.520.000	0	Rp. 18.240.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 99.270.000
	[-]					

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp. 11.460.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp. 13.260.000
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.942.500	0	Rp. 23.310.000
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp. 36.120.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.160.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 8.160.000
Grand Total :						Rp. 141.510.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan tertibnya administrasi keuangan maka diperlukan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas 8 orang ASN Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja barang dan jasa untuk mendukung administrasi pelaksanaan tugas ASN	Januari s/d Desember
2.	Belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif yang meliputi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Terbayarnya honor 8 ASN berdasarkan pertimbangan objektif demi terlaksananya tertib administrasi keuangan.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp141.510.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si,CFrA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFrA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

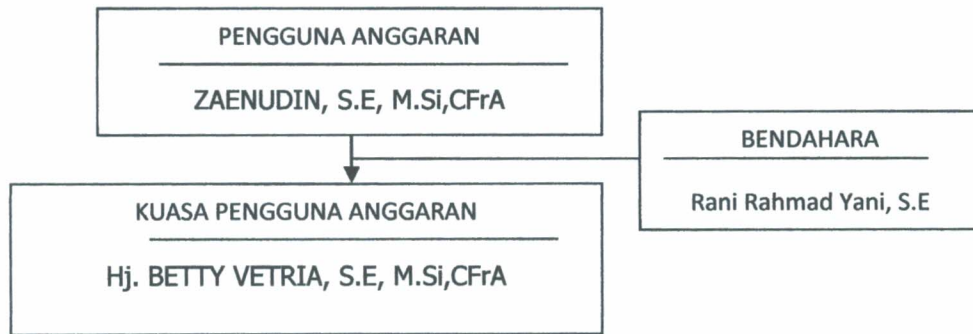
E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp2.985.600,-

II. SASARAN KEGIATAN :

Penatausahaan barang milik daerah SKPD merupakan proses kegiatan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah yang ada pada perangkat daerah demi terlaksananya tertib administrasi Barang Milik Daerah.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 2.985.600
Keluaran	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD					1 dokumen
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.985.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.985.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.985.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.985.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.985.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.257.600
	[#]					Rp. 1.257.600
	[-]					
	box file besi Spesifikasi : 1 susun	4 Buah	Pcs	67.000	0	Rp. 268.000
	isi staples Spesifikasi : kecil	30 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp. 90.000
	odner Spesifikasi : 15 pcs	1 Kotak	Dus	525.000	0	Rp. 525.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	2 Pcs	Kotak	73.300	0	Rp. 146.600
	stabilo Spesifikasi :	12 Pcs	Pcs	4.500	0	Rp. 54.000
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	30 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp. 174.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.728.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	6912 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.728.000
Grand Total :						Rp. 2.985.600

KERANGKA ACUAN KERJA

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan tertibnya administrasi barang milik daerah maka diperlukan langkah penatausahaan barang milik daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah demi tertibnya administrasi barang milik daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja barang dan jasa untuk mendukung penatausahaan barang milik daerah	Januari s/d Desember
2.	Koordinasi penatausahaan barang milik daerah	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Laporan penatausahaan barang milik daerah sebanyak 1 dokumen.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp2.985.600,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



HJ. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

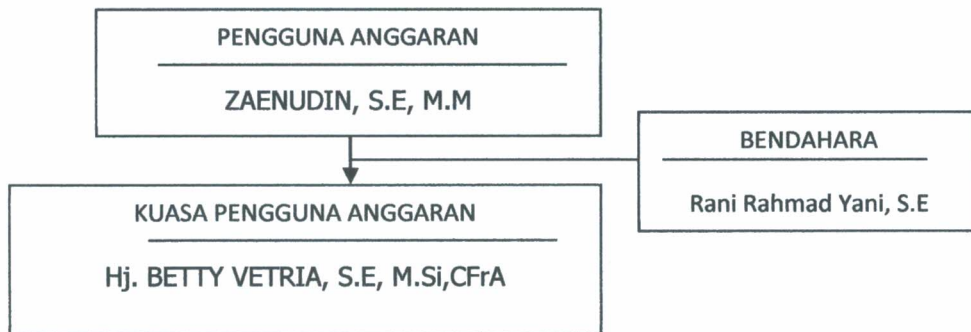
E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp54.900.000,-

II. SASARAN KEGIATAN :

Pengamanan barang milik daerah SKPD merupakan proses kegiatan dalam rangka mengamankan barang milik daerah yang ada pada perangkat daerah demi terlaksananya tertib administrasi Barang Milik Daerah.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 54.900.000	
Keluaran	Jumlah BMD yang diasuransikan				9 unit/set	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 54.900.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 54.900.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 54.900.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp. 54.900.000
	[#] Asuransi Barang Milik Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.900.000
	[-]					
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Minibus	8 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	5.200.000	0	Rp. 46.900.000
	[#] Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000
	[-]					
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Gedung Kantor	1 Unit / Tahun	permanen, 1 lantai	8.000.000	0	Rp. 8.000.000
Grand Total :						Rp. 54.900.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan tertibnya administrasi barang milik daerah maka diperlukan langkah pengamanan barang milik daerah Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya 8 unit kendaraan dan 1 unit bangunan Gedung kantor, Barang Milik Daerah demi Tertibnya administrasi barang milik daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja asuransi barang milik daerah untuk 8 unit kendaraan dinas dan 1 gedung kantor	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Barang milik daerah yang diasuransikan (8 unit kendaraan dan 1 gedung kantor).

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp54.900.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HJ. BETTY VETRIA', written over a horizontal line.

Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFrA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

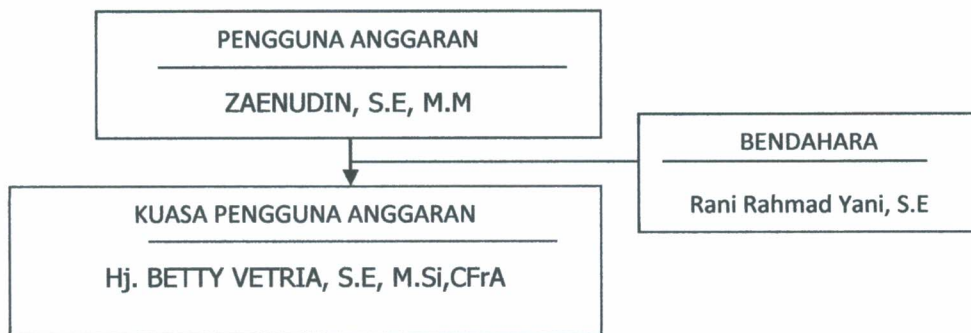
E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp6.544.250,-

II. SASARAN KEGIATAN :

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD merupakan proses kegiatan dalam rangka mendapatkan dokumen hasil pemantauan dan penertiban serta terbayarnya honor pengelola barang milik daerah yang ada pada perangkat daerah demi terlaksananya tertib administrasi Barang Milik Daerah.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 6.544.250
Keluaran	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorarnya					1 dokumen 3 orang
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.544.250
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.544.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.544.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.544.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.544.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 784.800
	[#]					Rp. 784.800
	[-]					
	Box File Spesifikasi : folio	24 Buah	Buah	32.700	0	Rp. 784.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 812.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	14 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 812.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.732.250
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	6929 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.732.250
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.263.200
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink catridge lc 3617 y	8 Kotak	Buah	157.900	0	Rp. 1.263.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.952.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.952.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	8 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 1.408.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	8 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 544.000
Grand Total :						Rp. 6.544.250

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN, PENGAWASAN dan PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH pada SKPD

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan tertibnya administrasi barang milik daerah maka diperlukan langkah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah terbuatnya 1 dokumen hasil pemantauan dan penertiban.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja barang dan jasa untuk mendukung pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Dokumen hasil pemantauan dan penertiban sebanyak 1 dokumen.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp6.544.250,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan Sub Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

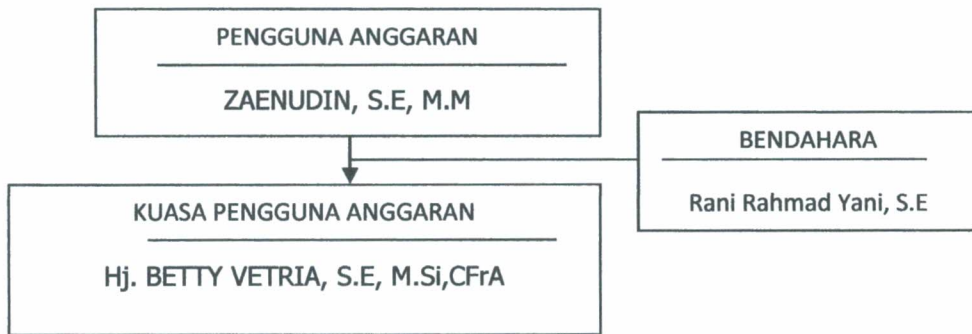
E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp15.412.000,-

II. SASARAN KEGIATAN :

Peningkatan pemahaman ASN Inspektorat Daerah Provinsi terkait implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.412.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.412.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.412.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.412.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.412.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.412.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis ke luar provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.412.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.560.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 1.900.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 2.952.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 5.300.000
	Uang Harian Perjadin dalam rangka Diklat Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 5 Kali	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.100.000
	Uang Harian Perjadin dalam rangka Diklat Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 1.600.000
Grand Total :						Rp. 15.412.000

KERANGKA ACUAN KERJA

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan mendukung administrasi kepegawaian perangkat daerah serta meningkatkan pemahaman ASN Inspektorat Daerah Provinsi terhadap peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja perjalanan dinas bimtek	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Terlaksananya BIMTEK Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 20 kali dalam tahun 2023.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp15.412.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HJ. BETTY VETRIA', written over a horizontal line.

HJ. BETTY VETRIA, S.E, M.Si,CFrA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFrA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp19.560.000,-

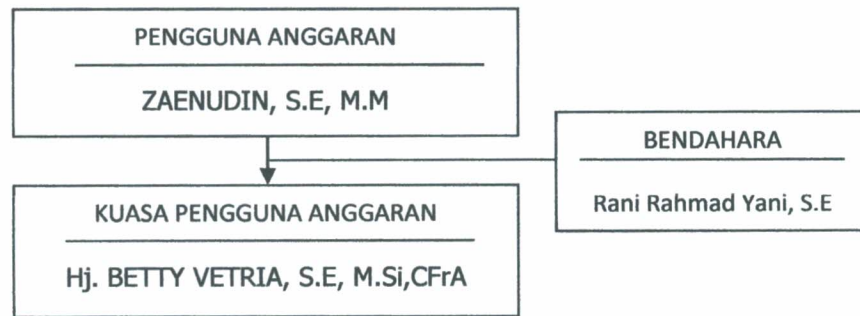
II. SASARAN KEGIATAN :

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan kuantitas sumber daya pengawas yang professional. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera barat berusaha meningkatkan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan meningkatkan professional aparat pengawasan.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 19.560.000	
Keluaran	jumlah asn yang mengikuti sossialisasi jumlah sosialisasi yang dilaksanakan				48 orang 8 kali	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 19.560.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.560.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.560.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.560.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.560.000
	#] Perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi peraturan perundang-undangan					Rp. 19.560.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	6 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 7.800.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 9.120.000
	Uang Harian Perjadin dalam rangka Diklat Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 2.640.000
Grand Total :						Rp. 19.560.000

KERANGKA ACUAN KERJA

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan kuantitas sumber daya pengawas yang professional Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan meningkatkan professional aparat pengawasan.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (8 kali)	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Terlaksananya dan diikutinya sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 8 kali.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp19.560.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si,CFrA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan Sub Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, A.Md
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp1.063.360.000,-

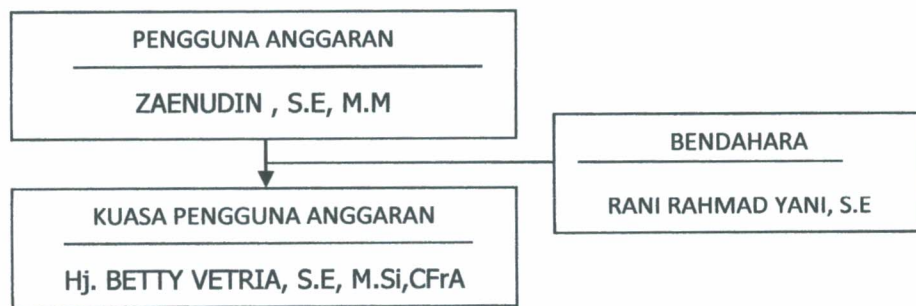
II. SASARAN KEGIATAN :

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Mengefektifkan SDM melalui peningkatan keilmuan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 1.063.360.000
Keluaran	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					610 orang
	jumlah ASN dan nNOno ASN yang mengikuti kegiatan capacity building					120 orang
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.063.360.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.063.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.063.360.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.080.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.080.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.100.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.100.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	5 Meter x 2 Meter x 2 Kali	M2	45.000	0	Rp. 900.000
	sertifikat Spesifikasi : uk.f4, full hard carbon 230 gram, full color	70 Orang x 2 Kali	Lembar	30.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.980.000
	[#] Biaya konsumsi peserta PKS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.540.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	70 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 6.160.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	70 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 2.380.000
	[#] Biaya konsumsi peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.540.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	70 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 6.160.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	70 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 2.380.000
	[#] Biaya Konsumsi Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Setelah Pendidikan dan Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.900.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	70 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 11.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 572.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 26.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 26.600.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.600.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	2 Orang x 7 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 25.200.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 546.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 546.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 546.000.000
	[-]					
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	70 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp. 546.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 456.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 456.680.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 456.680.000
	[#] Belanja Perjalanan Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 456.680.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	70 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 26.600.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	70 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 35.840.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	70 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 206.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	70 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 74.200.000
	Uang Harian Perjadin dalam rangka Diklat Spesifikasi : SUMATERA BARAT	70 Orang x 6 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 46.200.000
	Uang Harian Perjadin dalam rangka Diklat Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	70 Orang x 6 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 67.200.000
Grand Total :						Rp. 1.063.360.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. LATAR BELAKANG

Pelatihan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan penyesuaian sikap seseorang terhadap tugas-tugas yang ditangani. Kinerja yang memadai membutuhkan komitmen yang kuat terhadap kepentingan organisasi dan akan bermakna apabila didukung oleh tiga unsur utama yaitu : Pengetahuan (knowledge), Keterampilan (skill) dan Sikap (attitude). Ketiga unsur tersebut dapat dioptimumkan melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Mengefektifkan SDM melalui peningkatan keilmuan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pelatihan Kantor Sendiri (70 orang)	Januari s/d Desember
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (70 orang)	Januari s/d Desember
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Setelah Pendidikan dan Pelatihan (70 orang)	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi 70 orang ASN Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp1.063.360.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si,CFrA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan	
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFrA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp32.640.000,-

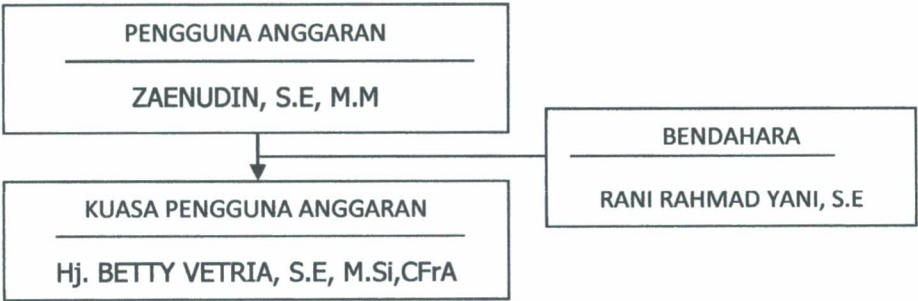
II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk peningkatan pengetahuan dan kinerja pegawai Inspektorat Provinsi dengan menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor untuk memberikan pelayanan yang maksimal dilingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 32.640.000
Keluaran	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					246 unit/set
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 32.640.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 29.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 29.640.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 29.640.000
	# Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.640.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH. Pusat - Kompas	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 3.300.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	9 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 12.960.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Singgalang	4 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 5.760.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 2.400.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Haluan	1 Eksemplar x 12 Buah	Bulan	120.000	0	Rp. 1.440.000

[illegible]

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Provinsi , program dan kegiatan yang bersifat rutinitas perlu untuk lebih ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan penyediaan jasa di lingkup Inspektorat Provinsi.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor untuk memberikan pelayanan yang maksimal dilingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja Langganan Surat Kabar/Surat Kabar/Majalah	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan selama 12 bulan.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp32.640.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si,CFrA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp6.481.800,-

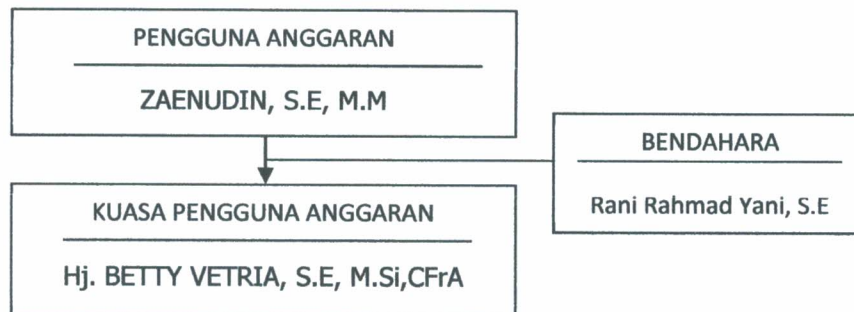
II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik untuk kantor selama satu tahun.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 6.481.800
Keluaran	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					117 unit/set
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.481.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.481.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.481.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.481.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.481.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 6.481.800
	# Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.481.800
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : aaa	10 Lusin	Lusin	43.000	0	Rp. 430.000
	colokan cabang Spesifikasi : 10a 250v_x005F_x005f_x005F_x000d_	10 Unit	Unit	20.000	0	Rp. 200.000
	isolasi listrik Spesifikasi : besar	22 Buah	Buah	14.400	0	Rp. 316.800
	kabel raund Spesifikasi : rakitan	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 450.000
	lampu listrik Spesifikasi : bola lampu hemat energi 40 watt	30 Buah	Buah	58.500	0	Rp. 1.755.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	lampu uv Spesifikasi : 30 watt	5 Buah	Buah	390.000	0	Rp. 1.950.000
	mcb Spesifikasi : 4 ampere, 1 phase	5 Buah	Buah	168.000	0	Rp. 840.000
	Stop Kontak Spesifikasi : cream	20 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 540.000
Grand Total :						Rp. 6.481.800

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

A. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik untuk kantor selama tahun 2023.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja alat listrik dan Elektronik (117 buah)	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Terakomodirnya kebutuhan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan pada tahun 2023.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp6.481.800,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFrA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp98.325.180,-

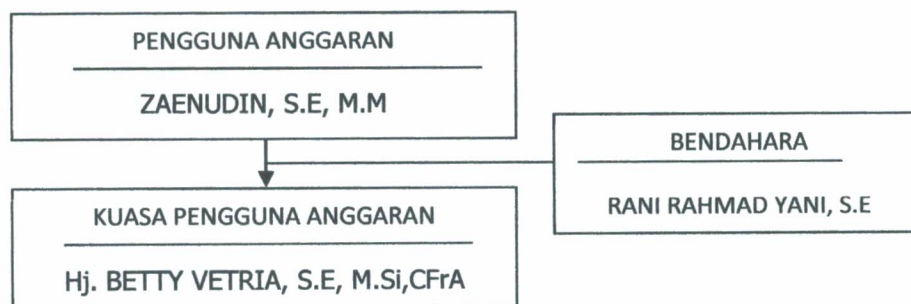
II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan guna meningkatkan kinerja aparatur dengan menyediakan bahan logistik kantor yang lengkap yang menjadikan peningkatan kinerja pegawai.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menunjang tugas pegawai dengan tersedianya bahan logistik yang lengkap.
2. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 98.325.180	
Keluaran	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				2790 unit/set	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 98.325.180
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 98.325.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 98.325.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 98.325.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 98.325.180
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 1.250.000
	# isi tabung pemadam kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.250.000
	[-]					
	isi tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : 3kg	5 Unit	Tabung	250.000	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.513.500
	# Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.513.500
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : no.155	10 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp. 1.958.000
	binder clip Spesifikasi : 260	40 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp. 684.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Box File Spesifikasi : folio	15 Buah	Buah	35.200	0	Rp. 528.000
	brief ordener Spesifikasi : a4	12 Buah	Buah	54.300	0	Rp. 651.600
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	10 Buah	Buah	15.800	0	Rp. 158.000
	buku tulis Spesifikasi : 100	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp. 327.000
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	10 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp. 537.000
	Gunting Spesifikasi : st-180	20 Pcs	Pcs	7.400	0	Rp. 148.000
	isi staples Spesifikasi : kecil	100 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp. 300.000
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	10 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp. 568.000
	isolasi Spesifikasi :	6 Pack	Pack	74.500	0	Rp. 447.000
	Lakban Spesifikasi : bening	5 Lusin	Lusin	59.500	0	Rp. 297.500
	Map Spesifikasi : spring	100 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp. 630.000
	Map Spesifikasi : snelhecter	10 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp. 1.816.000
	Map Plastik Spesifikasi : a4	100 Buah	Buah	5.100	0	Rp. 510.000
	mata pisau Spesifikasi : I150	19 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp. 98.800
	Memo Stick Spesifikasi : mms-654	11 Pack	Pack	6.300	0	Rp. 69.300
	odner Spesifikasi : 12 pcs	10 Lusin	Lusin	276.000	0	Rp. 2.760.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 85 n	5 Buah	Buah	69.500	0	Rp. 347.500
	Pembatas Kertas Spesifikasi : im31	2 Pack	Pack	216.300	0	Rp. 432.600
	pena Spesifikasi : 12 pcs	40 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp. 2.932.000
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	12 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp. 312.000
	Penggaris Spesifikasi : 30 cm	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800
	Pisau Cutter Spesifikasi : I 500	10 Buah	Buah	23.400	0	Rp. 234.000
	pita mesin ketik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	73.900	0	Rp. 295.600
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	2 Pack	Pack	99.800	0	Rp. 199.600
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	2 Pack	Pack	60.600	0	Rp. 121.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stapler Spesifikasi : hd 50	40 Buah	Buah	18.300	0	Rp. 732.000
	Stapler Spesifikasi : hd 50	30 Buah	Buah	26.500	0	Rp. 795.000
	Sticky Note Spesifikasi : ksy 105	30 Kotak	Kotak	63.300	0	Rp. 1.899.000
	tali bendera Spesifikasi : nilon 10 mm	1 Roll	Roll	400.000	0	Rp. 400.000
	tinta stempel Spesifikasi : tinta stempel	10 Buah	Buah	11.200	0	Rp. 112.000
	trigonal clip Spesifikasi : no 5	200 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp. 1.160.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 22.601.000
	[#] Kertas dan Cover					Rp. 22.601.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : a3 70 gr	5 Rim	Rim	98.000	0	Rp. 490.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	100 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 5.800.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	170 Rim	Rim	51.300	0	Rp. 8.721.000
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	6 Dus	Dus	632.500	0	Rp. 3.795.000
	Kertas NCR Spesifikasi : middle hijau	6 Dus	Dus	632.500	0	Rp. 3.795.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.090.680
	[#] Bahan Komputer					Rp. 11.090.680
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	catridge printer Spesifikasi : 831	4 Unit	Unit	316.000	0	Rp. 1.264.000
	catridge printer Spesifikasi : cl 41	8 Unit	Unit	374.000	0	Rp. 2.992.000
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	3 Buah	Buah	164.200	0	Rp. 492.600
	mouse Spesifikasi : 1100x - grey	3 Buah	Unit	183.200	0	Rp. 549.600
	pita printer Spesifikasi :	8 Buah	Buah	157.900	0	Rp. 1.263.200
	tinta printer Spesifikasi : standar capacity black toner	5 Buah	Buah	668.200	0	Rp. 3.343.880
	tinta printer Spesifikasi : (bp-c810k) - black pigment (merchant)	22 Unit	Unit	44.700	0	Rp. 983.400
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml - magenta	4 Unit	Unit	50.500	0	Rp. 202.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 40.870.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Internal Staff					Rp. 16.470.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	90 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 11.880.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	90 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 4.590.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.400.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 1 Hari x 20 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 6.800.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 1 Hari x 20 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 17.600.000
Grand Total :						Rp. 98.325.180

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan administrasi pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat diperlukan faktor-faktor penunjang yang mendukung kinerja aparatur dalam menjalankan aktivitasnya yakni terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, tersedianya kertas dan cover dan tersedianya bahan komputer untuk menunjang aktivitas para pegawai.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menunjang tugas pegawai dengan tersedianya bahan logistik yang lengkap.
2. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Penyediaan bahan logistik kantor	Januari s/d Desember
2.	Belanja makanan dan minuman kebutuhan rapat	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Tersedianya bahan logistik kantor untuk 12 bulan.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp98.325.180,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'HJ. BETTY VETRIA', written over a horizontal line.

Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp37.092.647,-

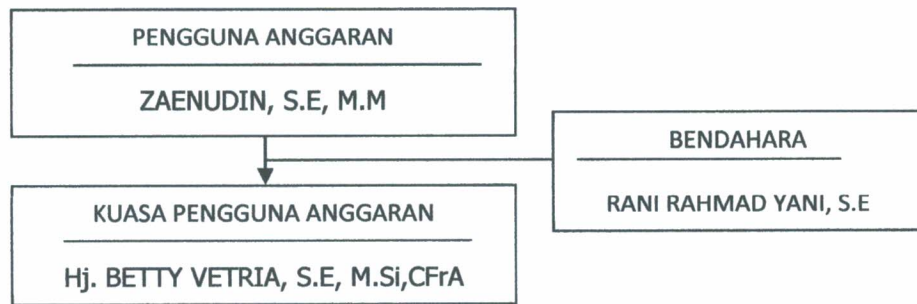
II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan guna meningkatkan kinerja aparatur dengan menyediakan barang cetak dan penggandaan dalam mendukung pekerjaan di Inspektorat Daerah Provinsi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menunjang tugas pegawai dengan tersedianya barang cetak dan penggandaan.
2. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 37.092.647
Keluaran	jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan					40 kali
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 37.092.647
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.092.647
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.092.647
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 37.092.647
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 37.092.647
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 37.092.647
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.092.647
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	70 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp. 2.800.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	156 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 4.056.000
	cetak map opd Spesifikasi : full colour	1848 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 12.936.647
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	400 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp. 6.800.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	42000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 10.500.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan administrasi pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat diperlukan faktor-faktor penunjang yang mendukung kinerja aparatur dalam menjalankan aktivitasnya yakni terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetak dan penggandaan dokumen.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menunjang tugas pegawai dengan tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
2. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengadaan barang cetak	Januari s/d Desember
2.	Penggandaan dokumen-dokumen	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor untuk 12 bulan

1

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp37.092.647,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si,CFrA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp22.249.400,-

G.

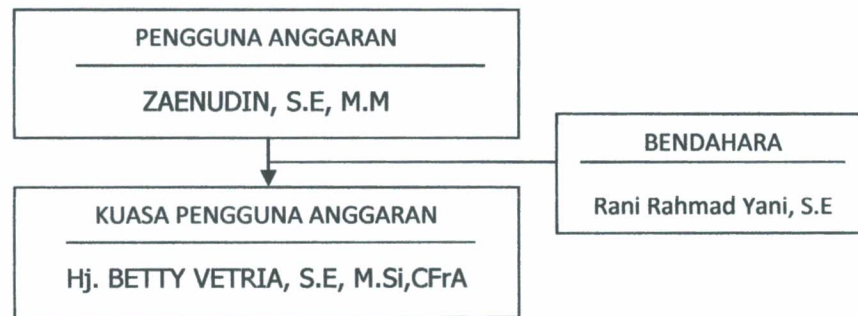
II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk kantor sehingga dapat menunjang dan meningkatkan kinerja.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 22.249.400
Keluaran	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					30 unit/set
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 22.249.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.576.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.576.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.576.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.576.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.473.400
	#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.473.400
	[-]					
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	2 Buah	Buah	246.700	0	Rp. 493.400
	stempel Spesifikasi : 1	7 Buah	Buah	140.000	0	Rp. 980.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 10.103.000
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.103.000
	[-]					
	Bunga Hiasan Meja Spesifikasi : speksifikasi : bunga hiasan meja	20.206 Buah	Orang	500.000	0	Rp. 10.103.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 10.673.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 10.673.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 10.673.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 6.673.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 6.673.000
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.673.000
	[-]					
	alat penghancur kertas Spesifikasi : capacity: 24 liter shred speed: 6.7ft/min	5 Unit	Unit	1.334.600	0	Rp. 6.673.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 4.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 4.000.000
	dispenser Spesifikasi : gea halley dispenser galon bawah 3 tombol pipa stainless	2 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
Grand Total :						Rp. 22.249.400

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

A. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dan untuk koordinasi dengan instansi terkait, maka penyediaan peralatan dan perlengkapan sangat dibutuhkan didalam mendukung kelancaran kegiatan, sehingga diharapkan produktivitas dapat dicapai secara optimal.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk kantor sehingga dapat menunjang dan meningkatkan kinerja.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja Modal Lemari Besi sebanyak 30 unit	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Terakomodirnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan untuk kantor selama 12 bulan.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp22.249.400,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hj. Betty Vetría', written over a horizontal line.

Hj. BETTY VETRÍA, S.E, M.Si, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFrA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp539.550.000,-

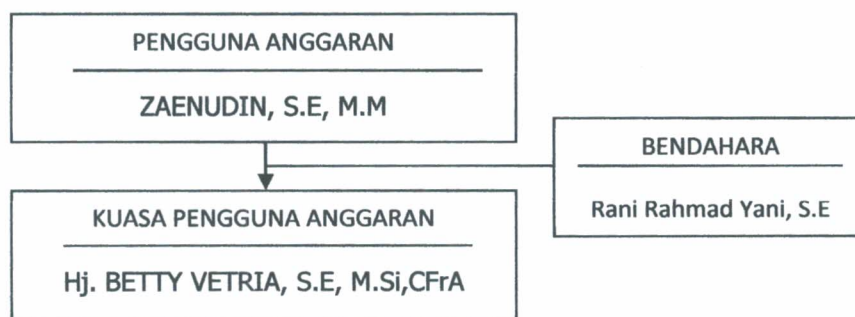
II. SASARAN KEGIATAN :

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sangat dibutuhkan didalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien. Adapun maksud, tujuan dan sasaran adalah terpenuhinya dalam menghadiri undangan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 539.550.000
Keluaran	jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi					81 dokumen
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 539.550.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 539.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 539.550.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 539.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 539.550.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 539.550.000
	#] Kunjungan Kerja bersama mendampingi DPRD keluar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 220.680.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 10.240.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 7.600.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang x 4 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 59.040.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 89.400.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	5 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 42.400.000
	[#] Pemukhtahiran Data Regional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.498.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.048.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 1.520.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 4.380.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 6.360.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka Forkom JFA diluar Provinsi dan Konsultasi dengan BPKP Pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.074.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.048.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 6.360.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka rapat kerja/rakor/konsultasi dan koordinasi dan undangan lainnya dari kementerian terkait Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 161.928.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 10.240.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 7.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang x 4 Kali	Orang / pp	2.952.000	0	Rp. 59.040.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 11.920.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 23.808.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 17.520.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 31.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi ke Pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.282.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 760.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 1 Kali	Orang / pp	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000
	[#] Perjalanan Dinas terkait Tanggapan Temuan dan Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Itjen Kemendagri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.746.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 570.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 768.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 2 Kali	Orang / pp	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	3 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	Rp. 9.600.000
	[#] Perjalanan Dinas unit pencegahan dan Pemberantasan Pungli ke Pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.794.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 1.140.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.536.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 8.856.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 4.470.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.240.000
	[#] Rakorwasnas se Indonesia di Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.548.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 1.520.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.048.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.770.000
Grand Total :						Rp. 539.550.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

A. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sangat dibutuhkan didalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

B. TUJUAN

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Januari s/d Desember
2.	Koordinasi Tim Terpadu dalam rangka kenaikan pangkat dan pengurusan pensiun ke BKN	Januari s/d Desember
3.	Kunjungan kerja bersama mendampingi DPRD keluar Provinsi	Januari s/d Desember
4.	Pengambilan Data dan Informasi lainnya ke	Januari s/d Desember

	Kabupaten/ Kota	
5.	Perjalanan dinas dalam rangka undangan dan fasilitasi/ koordinasi dinas /instansi terkait ke Kab/Kota	Januari s/d Desember
6.	Perjalanan dinas dalam rangka pelayanan tamu, undangan dan kunjungan lainnya	Januari s/d Desember
7.	Memfasilitasi pengisian data ICQ ke Kantor Penghubung	Januari s/d Desember
8.	Monitoring/Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Auditor ke Kab/Kota	Januari s/d Desember
9.	Rapat kerja/rakor/konsultasi dan koordinasi dan undangan lainnya dari kementrian terkait	Januari s/d Desember
10.	Forkom JFA diluar Provinsi dan Konsultasi dengan BPKP Pusat	Januari s/d Desember
11.	Menyampaikan LHP dan fasilitasi TLHP ke Kab/Kota	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama tahun 2023.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp539.550.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, A.Md
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp606.737.191,-

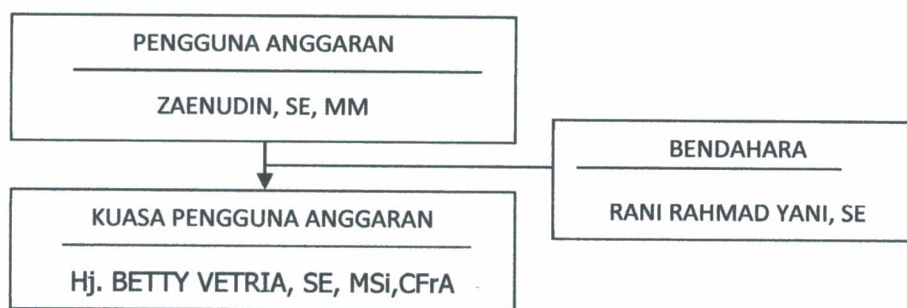
II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor dengan maksud untuk memberikan pelayanan yang maksimal di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor untuk memberikan pelayanan yang maksimal di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 606.737.191	
Keluaran	jumlah tenaga pelayanan umum				79 orang	
Hasil	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 606.737.191
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 606.737.191
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 606.737.191
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.555.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.555.650
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 12.865.650
	# Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.865.650
	[-]					
	deterjen Spesifikasi : 1 lt	5 Buah	Buah	32.400	0	Rp. 162.000
	kanebo Spesifikasi : jumbo	24 Buah	Buah	59.000	0	Rp. 1.416.000
	kapur barus Spesifikasi : bewarna	20 Buah	Buah	22.800	0	Rp. 456.000
	payung lipat Spesifikasi : parasut	12 Buah	Unit	131.900	0	Rp. 1.582.800
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	70 Botol	Botol	17.900	0	Rp. 1.253.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	pembersih lantai Spesifikasi : 5 kg	25 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 1.875.000
	pembersih wc Spesifikasi :	50 Bks	Bks	18.000	0	Rp. 900.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : air freshener apple	100 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 1.200.000
	Sabun Colek Spesifikasi : cream 500 gr	25 Buah	Buah	6.100	0	Rp. 152.500
	sabun mandi Spesifikasi : refill 800 ml	2 Buah	Buah	46.800	0	Rp. 93.600
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	92.300	0	Rp. 923.000
	Sikat WC Spesifikasi : bulat	5 Buah	Buah	35.750	0	Rp. 178.750
	Sodok Sampah Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	92.300	0	Rp. 923.000
	tisu Spesifikasi : tisu wajah pak isi ulang 600""s	50 Buah	Pak	35.000	0	Rp. 1.750.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 4.590.000
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.590.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 4.590.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 14.100.000
	[#] Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.100.000
	[-]					
	Belanja Pakaian Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN/NON ASN	6 Orang x 1 Stel	Stel	750.000	0	Rp. 4.500.000
	Belanja Pakaian Kerja Non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Seragam dan kelengkapan Tenaga Kebersihan	2 Orang x 2 Buah	stell	300.000	0	Rp. 1.200.000
	Belanja Pakaian Kerja Non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Seragam dan kelengkapan Tenaga Pengaman	7 Orang x 1 Stel	stell	1.200.000	0	Rp. 8.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 575.181.541
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 575.181.541
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 2.800.000
	[#] Honorarium Rohaniwan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.800.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 1.200.000
	Jasa Rohaniawan Spesifikasi : Pengambil Sumpah Jabatan	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 6.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.300.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Penceramah agama acara SKPD	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 1.800.000
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Instruktur Olahraga di SKPD	1 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 68.695.726
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 68.695.726
	[-]					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	3.122.533	0	Rp. 68.695.726
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 295.094.800
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 295.094.800
	[-]					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Pengaman	7 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	3.832.400	0	Rp. 295.094.800
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 202.291.015
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 202.291.015
	[-]					
	Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Sopir	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	3.127.200	0	Rp. 202.291.015
Grand Total :						Rp. 606.737.191

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM DAN KANTOR

A. LATAR BELAKANG

Untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Provinsi , program dan kegiatan yang bersifat rutinitas perlu untuk lebih ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan penyediaan jasa di lingkup Inspektorat Provinsi.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor untuk memberikan pelayanan yang maksimal dilingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Rapat-rapat tentang pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Januari s/d Desember
2.	Jasa Honorarium Rohaniwan	Januari s/d Desember
3.	Jasa Tenaga Ahli (Instruktur Olahraga)	Januari s/d Desember
4.	Jasa Tenaga Kebersihan	Januari s/d Desember
5.	Jasa Tenaga Keamanan	Januari s/d Desember
6.	Jasa Tenaga Supir	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Tersedianya pelayanan umum kantor untuk 12 bulan.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp606.737.191,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFrA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp4.500.000,-

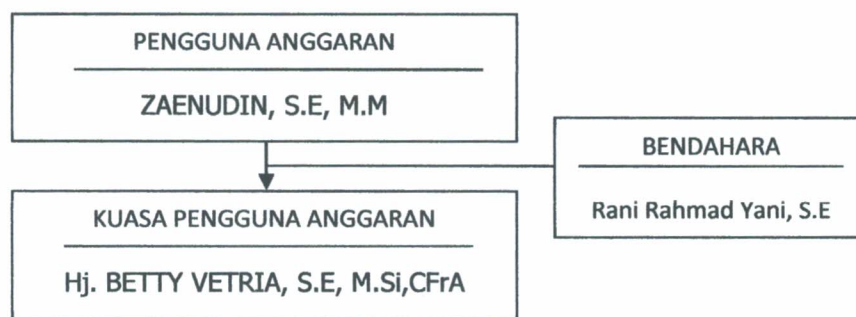
II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan untuk kantor sehingga dapat menunjang dan meningkatkan kinerja.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 4.500.000
Keluaran	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipeihara (spanduk)					5 unit
Hasil	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.500.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	100 M2	M2	45.000	0	Rp. 4.500.000
Grand Total :						Rp. 4.500.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

A. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk koordinasi dengan instansi terkait, maka penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan sangat dibutuhkan didalam mendukung kelancaran kegiatan, sehingga diharapkan produktivitas dapat dicapai secara optimal.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan untuk kantor sehingga dapat menunjang dan meningkatkan kinerja.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Melakukan Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan kantor	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Terakomodirnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan untuk kantor selama 12 bulan.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp4.500.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRÍA, S.E, M.Si,CFrA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFrA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp401.642.400,-

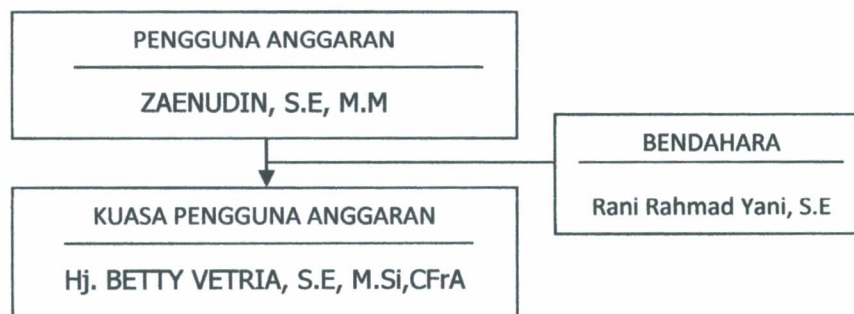
II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya langganan air dan listrik selama satu tahun.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 401.642.400	
Keluaran	jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan				100 mbps 2 rekening 1740 meter kubik 144000 KVA	
Hasil	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 401.642.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 401.642.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 401.642.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 401.642.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 401.642.400
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 13.104.000
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.104.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	260 Menit x 2 Buah x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp. 13.104.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 15.660.000
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.660.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	145 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp. 15.660.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 205.718.400
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 205.718.400
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	11429 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp. 205.718.400
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 167.160.000
	[#] Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 167.160.000
	[-]					
	Belanja Internet Spesifikasi : Internet Office 10 Mbps, Broadband Up To, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload,	12 Bulan	Bulan	5.600.000	0	Rp. 67.200.000
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Astinet Lite 10 Mbps	12 Bulan	Unit / Bulan	4.830.000	0	Rp. 57.960.000
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN Radio Nanobridge	12 Bulan	Unit / Bulan	2.900.000	0	Rp. 34.800.000
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Aplikasi Zoom Meeting	12 Bulan	Unit / Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000
	Belanja kawat/faksimili/Internet/ TV Berlangganan Spesifikasi : Backup Aplikasi (SIMPATI) VPS Server Plan 4	1 Tahun	Tahun	4.200.000	0	Rp. 4.200.000
Grand Total :						Rp. 401.642.400

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

A. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, listrik dan Internet sangat dibutuhkan didalam kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet di inspektorat provinsi sumatera barat selama 1 tahun.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Melakukan pembayaran tagihan telepon, Air, Listrik, dan Internet	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Jumlah tagihan telepon, Air, Internet dan Listrik yang terbayar selama 12 bulan.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp401.642.400,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, S.E, M.M
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si, CFrA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp24.365.000,-

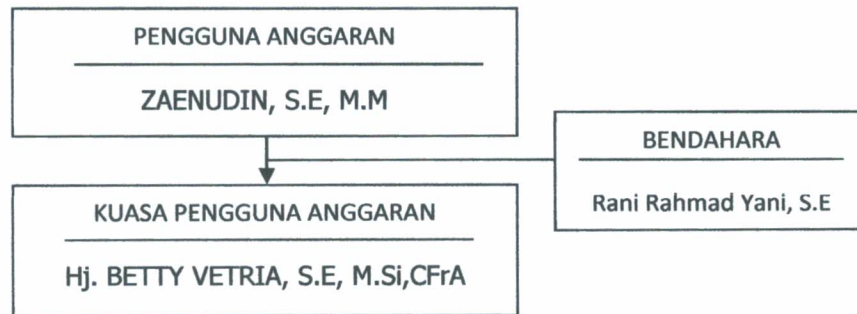
II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok administrasi pengantaran surat menyurat selama satu tahun.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat dinas (membantu proses distribusi) selama satu tahun.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 24.365.000
Keluaran	jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun					500 surat
Hasil	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 24.365.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.365.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.365.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.125.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.125.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 19.125.000
	#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.125.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	1500 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 19.125.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.000.000
	#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-]					
	materai Spesifikasi : 10000	500 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 240.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 240.000
	[#] Paket/Pengiriman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 240.000
	[-]					
	Belanja paket/pengiriman Spesifikasi : Jasa Pengiriman dokumen /paket (Dalam Negeri)	8 Kg	Kg	30.000	0	Rp. 240.000
Grand Total :						Rp. 24.365.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

A. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, maka penyediaan jasa surat menyurat sangat dibutuhkan didalam kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien..

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terlaksananya pelayanan surat menyurat dinas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Melakukan pengiriman surat/dokumen dalam kota maupun luar kota.	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Terakomodirnya pelayanan jasa surat menyurat dinas selama 12 bulan..

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp24.365.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, S.E, M.Si,CFrA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENGADAAN MEBEL

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Mebel
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 15.916.000,-

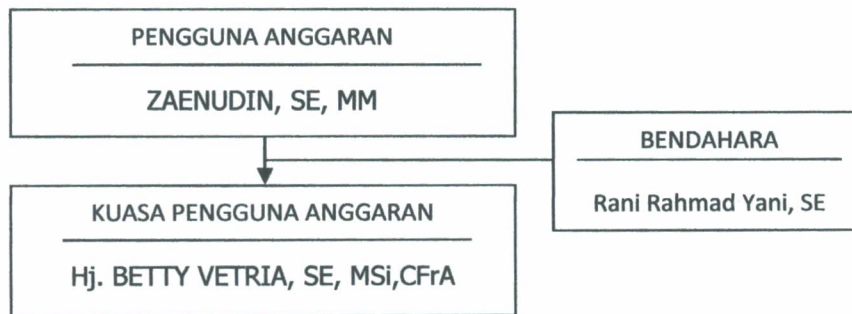
II. SASARAN KEGIATAN :

Pengadaan mebel dibutuhkan dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana kantor untuk mendukung pekerjaan pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terlaksananya pengadaan barang milik daerah

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.916.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 15.916.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 15.916.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 15.916.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 15.916.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 15.916.000
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.916.000
	[-]					
	kursi rapat Spesifikasi : foam, polywood,pvc	8 Unit	Unit	1.989.500	0	Rp. 15.916.000
Grand Total :						Rp. 15.916.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN MEBEL

A. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam melakukan pekerjaan rutin pegawai demi usaha dalam mencapai tujuan organisasi maka dibutuhkan pengadaan mebel dalam kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

B. TUJUAN

Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengadaan 8 unit kursi rapat	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Terlaksananya pengadaan barang milik daerah berupa 8 unit kursi rapat

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 15.916.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 226.243.400,-

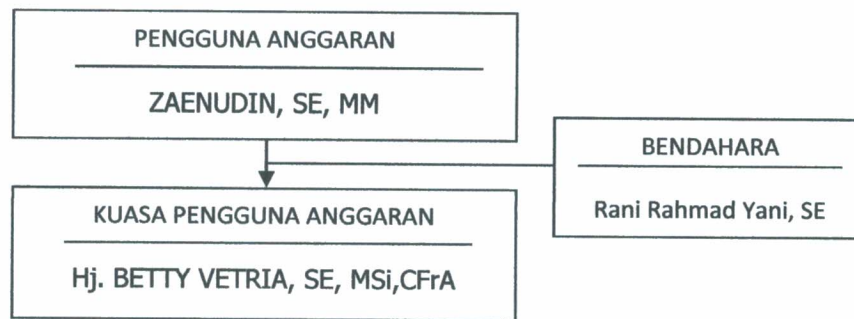
II. SASARAN KEGIATAN :

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dibutuhkan dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana kantor untuk mendukung pekerjaan pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terlaksananya pengadaan barang milik daerah

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 226.243.400
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 226.243.400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 226.243.400
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 186.989.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 186.989.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 186.989.000
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 186.989.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : intel i7	10 Unit	Unit	18.698.900	0	Rp. 186.989.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 39.254.400
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 39.254.400
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 39.254.400
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.254.400
	[-]					
	Printer Spesifikasi : 5,760 x 1,440 dpi	5 Unit	Unit	7.850.880	0	Rp. 39.254.400

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

A. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam melakukan pekerjaan rutin pegawai demi usaha dalam mencapai tujuan organisasi maka dibutuhkan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dalam kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

B. TUJUAN

Terlaksananya pengadaan barang milik daerah berupa peralatan dan mesin lainnya.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengadaan printer	Januari s/d Desember
2.	Pengadaan laptop	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

- 10 unit laptop core i 7
- 5 unit printer 5.760 x 1.440 dpi

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 226.243.400,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN PAJAK KENDERAAN PERORANGAN DINAS
ATAU KENDERAAN DINAS JABATAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 11.800.000,-

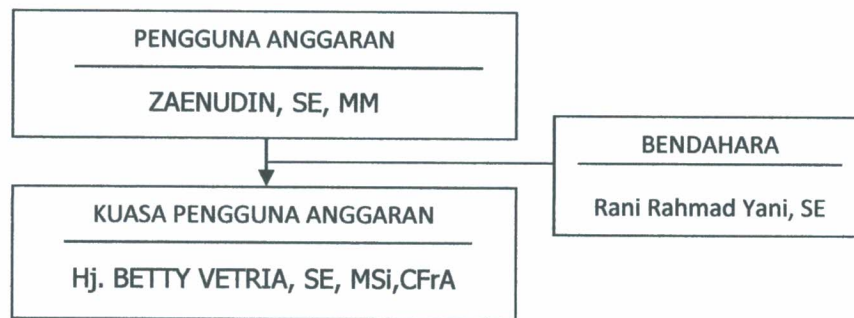
II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan ini merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas guna menjaga agar kendaraan dinas tidak mengalami kerusakan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas agar tidak adanya hambatan kerja karena kendaraan dinas dalam kondisi baik.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 11.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	1 Unit / Tahun x 0.9 %	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 10.000.000
	[#] Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDERAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDERAAN DINAS JABATAN

A. LATAR BELAKANG

Peran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, guna menunjang aktivitas tersebut diperlukan faktor-faktor penunjang yang mendukung kinerja aparatur dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satunya yakni adanya fasilitas kendaraan dinas yang memerlukan biaya pemeliharaan.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas agar tidak adanya hambatan kerja karena kendaraan dinas dalam kondisi baik.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas (jasa service, penggantian suku cadang)	Januari s/d Desember
2	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	Januari s/d Desember

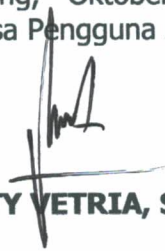
E. KELUARAN

Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan dinas selama 12 bulan.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp11.800.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN,
PAJAK DAN PERIZINAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL
ATAU LAPANGAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 73.173.500,-

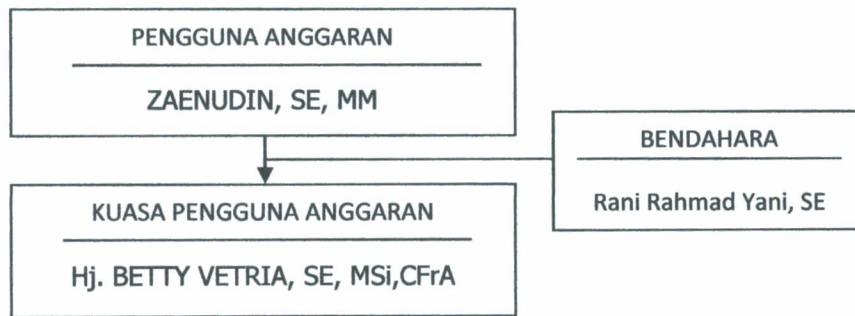
II. SASARAN KEGIATAN :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan ini merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas guna menjaga agar kendaraan dinas tidak mengalami kerusakan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas agar tidak adanya hambatan kerja karena kendaraan dinas dalam kondisi baik.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 73.173.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 73.173.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 73.173.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.023.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.023.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.023.500
	[#] Bahan Bakar Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.023.500
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	394 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 5.023.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.450.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 7.450.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.450.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 60.700.000
	[#] Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.700.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp. 58.200.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp. 2.500.000
Grand Total :						Rp. 73.173.500

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

A. LATAR BELAKANG

Peran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, guna menunjang aktivitas tersebut diperlukan faktor-faktor penunjang yang mendukung kinerja aparatur dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satunya yakni adanya fasilitas kendaraan dinas yang memerlukan biaya pemeliharaan.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas agar tidak adanya hambatan kerja karena kendaraan dinas dalam kondisi baik.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas (jasa service, penggantian suku cadang, STNK)	Januari s/d Desember
2.	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Terlaksananya jasa pemeliharaan 9 unit kendaraan dinas selama 12 bulan.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 73.173.500,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran


Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 43.750.000,-

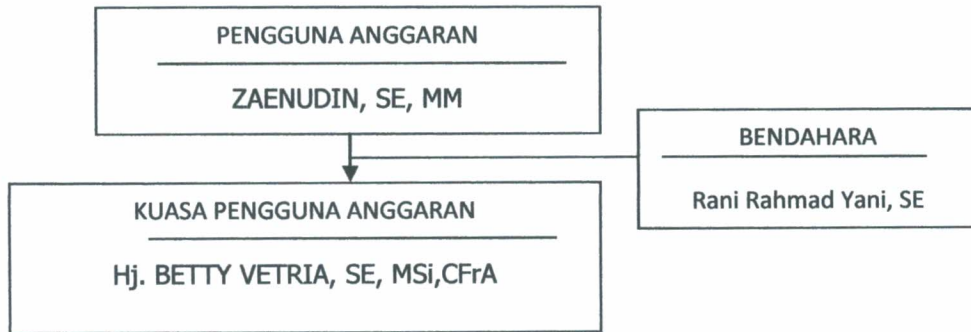
II. SASARAN KEGIATAN :

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya merupakan proses kegiatan dalam rangka memelihara peralatan dan mesin lainnya sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada pada perangkat daerah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya
2. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 43.750.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.750.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 43.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 43.750.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 14.600.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.600.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 14.600.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp. 5.000.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan Telepon/Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jaringan Telepon/Internet Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Telepon/Internet	1 Kali	Kali	3.500.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 24.150.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan terlaksananya pemeliharaan terhadap barang peralatan dan mesin lainnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2022.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya
2. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Peralatan dan mesin yang dipelihara:

1. Laptop/PC 20 unit
2. Pemeliharaan jaringan internet/telepon
3. Printer 35 unit

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 43.750.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 187.251.209,-

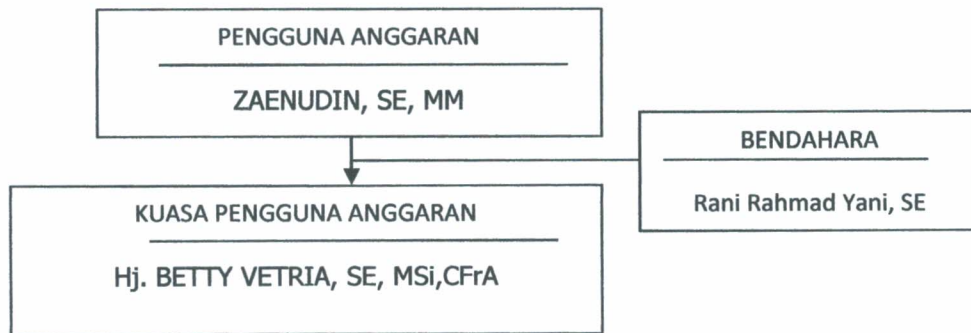
II. SASARAN KEGIATAN :

Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya merupakan proses kegiatan dalam rangka memelihara gedung kantor atau bangunan lainnya sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada pada perangkat daerah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi
2. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 187.251.209
5,1	BELANJA OPERASI					Rp. 187.251.209
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 187.251.209
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 187.251.209
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 187.251.209
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 187.251.209
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat kerja-Bangunan Gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 187.251.209
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	1029 M2/Tahun	M2/Tahun	182,000	0	Rp. 187.251.209
Grand Total :						Rp. 187.251.209

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan terlaksananya pemeliharaan terhadap barang milik daerah maka diperlukan langkah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2022.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi
2. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi dan dipelihara

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 187.251.209,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hj. Betty Vetria', written over a horizontal line.

Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Lokasi	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 24.160.000,-

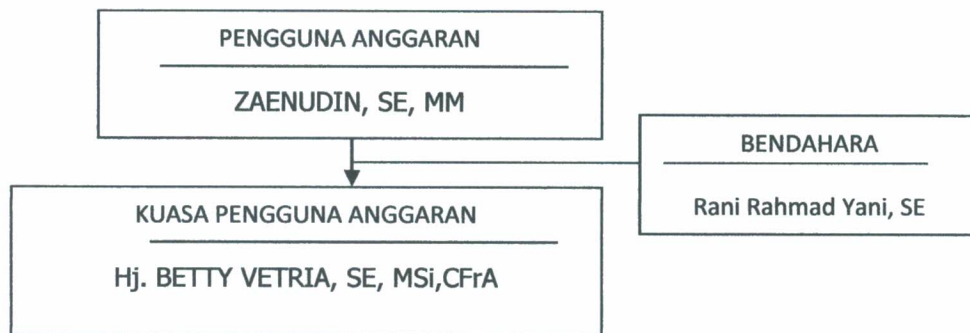
II. SASARAN KEGIATAN :

Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya merupakan proses kegiatan dalam rangka memelihara sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada pada perangkat daerah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi
2. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 24.160.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.160.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 24.160.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 24.160.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 5.860.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.860.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 5.860.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 18.300.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.300.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 18.300.000
Grand Total :						Rp. 24.160.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan terlaksananya pemeliharaan terhadap barang milik daerah maka diperlukan langkah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2022.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi
2. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (AC dan genset)	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi dan dipelihara

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 24.160.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hj. Betty Vetricia', written over a horizontal line.

Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, SE
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 1.087.081.533,-

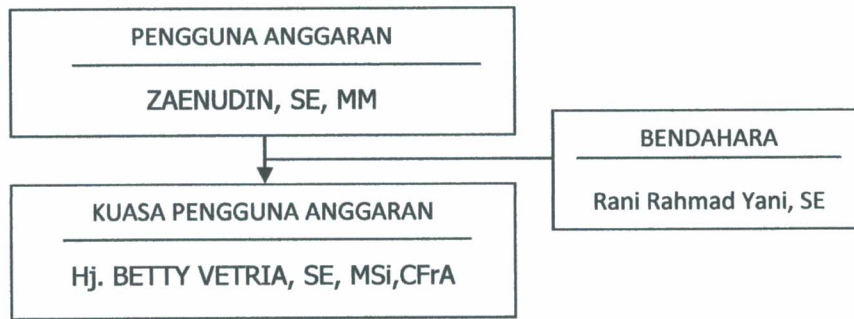
II. SASARAN KEGIATAN :

Pengawasan kinerja atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, asset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada OPD Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.087.081.533
5,1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.087.081.533
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.087.081.533
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 82.925.533
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 82.925.533
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 45.375.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.875.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	1500 Liter	Liter	13,250	0	Rp. 19.875.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.500.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	2000 Liter	Liter	12,750	0	Rp. 25.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.041.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.041.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.847.500
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.847.500
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	75 Rim	Rim	51,300	0	Rp. 3.847.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.750.033
	[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.750.033
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.750.033

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.492.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.492.000
	[-]					
	catridge printer Spesifikasi : 22 colour	10 Buah	Unit	322,000	0	Rp. 3.220.000
	Tinta Printer Spesifikasi : c13s0155156	40 Buah	Unit	56,800	0	Rp. 2.272.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.420.000
	[#] Konsumsi Rapat untuk Pembahasan/Pengkajian dalam rangka pemantapan temuan hasil pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.320.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	8 Orang x 1 Hari x 15 Kali	Orang / Kali	17,000	0	Rp. 2.040.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	8 Orang x 1 Hari x 15 Kali	Orang / Kali	44,000	0	Rp. 5.280.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.100.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	5 Orang x 1 Hari x 20 Kali	Orang / Kali	44,000	0	Rp. 4.400.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	5 Orang x 1 Hari x 20 Kali	Orang / Kali	17,000	0	Rp. 1.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.004.156.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.004.156.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.004.156.000
	[#] Evaluasi Pelayanan Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 63.300.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	7 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650,000	0	Rp. 36.400.000
	Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	75,000	0	Rp. 300.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380,000	0	Rp. 26.600.000
	[#] Monitoring Dana BOS (Cabang Dinas/Cabdin) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 202.286.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	5 Orang x 8 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650,000	0	Rp. 110.486.000
	Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	75,000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 10 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380,000	0	Rp. 91.200.000

[#] Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Desa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 72.300.000
[-]						
Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	4 Orang x 8 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650,000	0		Rp. 41.600.000
Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	75,000	0		Rp. 300.000
Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380,000	0		Rp. 30.400.000
[#] Pemeriksaan Reguler (Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/Staf) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 178.500.000
[-]						
Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 10 Hari x 17 Kali	Orang / Hari	150,000	0		Rp. 178.500.000
[#] Pem.reguler & Pemeriksaan Pendahuluan/ Lanjutan OPD di luar ibukota Provinsi (3 RSUD) dan SMK 1 Provinsi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 123.800.000
[-]						
Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	4 Orang x 6 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650,000	0		Rp. 62.400.000
Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	75,000	0		Rp. 600.000
Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 10 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380,000	0		Rp. 60.800.000
[#] Uji Petik ke Lapangan terhadap kegiatan OPD yang ber lokasi di Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 363.970.000
[-]						
Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	7 Orang x 2 Hari x 17 Kali	Orang / Hari	650,000	0		Rp. 154.700.000
Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 17 Kali	Orang / Hari	75,000	0		Rp. 2.550.000
Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 4 Hari x 17 Kali	Orang / Hari	380,000	0		Rp. 206.720.000
Grand Total :						Rp. 1.087.081.533

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk daerah propinsi dan Bupati/Walikota untuk daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dibantu oleh Inspektorat Daerah. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian , asset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka pengawasan kinerja pemerintah daerah	Januari s/d Desember
2.	Kegiatan rapat dalam rangka pembahasan/pengkajian dalam rangka pemantapan temuan hasil pemeriksaan	Januari s/d Desember
3.	Monitoring Dana BOS	Januari s/d Desember
4.	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Desa	Januari s/d Desember
5.	Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Pendahuluan/ lanjutan dalam Ibukota Propinsi (termasuk SMK Propinsi)	Januari s/d Desember
6.	Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Pendahuluan/ lanjutan OPD diluar Ibukota Propinsi (3 RSUD) dan SMK 1 Propinsi	Januari s/d Desember
7.	Uji Petik Evaluasi Pelayanan Publik (Pejabat Struktural/pejabat fungsional/staf)	Januari s/d Desember
8.	Uji Petik ke lapangan terhadap kegiatan OPD yang berlokasi di Kab/Kota	Januari s/d Desember
9.	Evaluasi Pelayanan Publik	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

1. Laporan pengawasan kinerja yang dihasilkan sebanyak 778 laporan
2. Meningkatnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.087.081.533,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran


HJ. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB KEGIATAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, SE
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 216.946.000,-

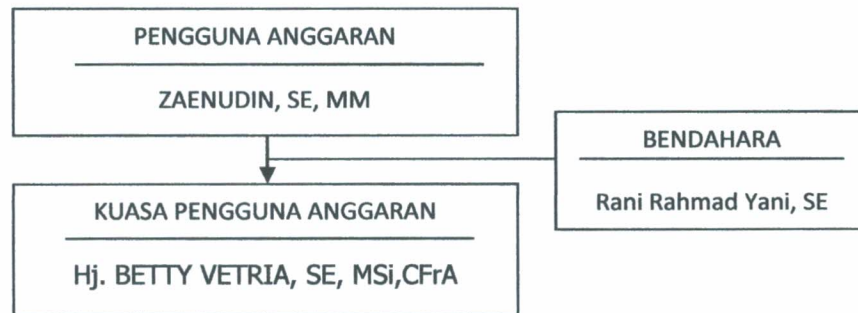
II. SASARAN KEGIATAN :

Pengawasan keuangan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, asset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada OPD Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 216.946.000
5,1	BELANJA OPERASI					Rp. 216.946.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 216.946.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.946.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.946.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.096.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.096.000
	[-]					
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	10 Kotak	Kotak Besar	56,800	0	Rp. 568.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	10 Kotak	Kotak	73,300	0	Rp. 733.000
	Stapler Spesifikasi : hd 50	30 Buah	Buah	26,500	0	Rp. 795.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	20 Per Rim	Rim	58,000	0	Rp. 1.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.250.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.250.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.440.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.440.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	8 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Kali	44,000	0	Rp. 1.760.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	8 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Kali	17,000	0	Rp. 680.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 210.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 210.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 210.000.000
	[#] Pengawasan Keuangan (Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/Staf) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 210.000.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 10 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	150,000	0	Rp. 210.000.000
Grand Total :						Rp. 216.946.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk daerah propinsi dan Bupati/Walikota untuk daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dibantu oleh Inspektorat Daerah. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian , asset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka pengawasan keuangan pemerintah daerah	Januari s/d Desember
2.	Pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah	Desember

E. KELUARAN

1. 307 Laporan Hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp216.946.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran


Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA

[illegible]

KERANGKA ACUAN KERJA

REVIU LAPORAN KEUANGAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk daerah propinsi dan Bupati/Walikota untuk daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dibantu oleh Inspektorat Daerah. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian , asset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka Reviu Laporan Keuangan dan pembahasan /pengkajian dalam rangka pemantapan temuan hasil reviu	Januari s/d Februari
2.	Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Barat	Januari s/d Februari
3.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah	Februari

E. KELUARAN

Laporan hasil reviu yang diterbitkan 52 LHR.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 21.128.100,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran


Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	: Reviu Laporan Kinerja
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, SE
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 11.820.500,-

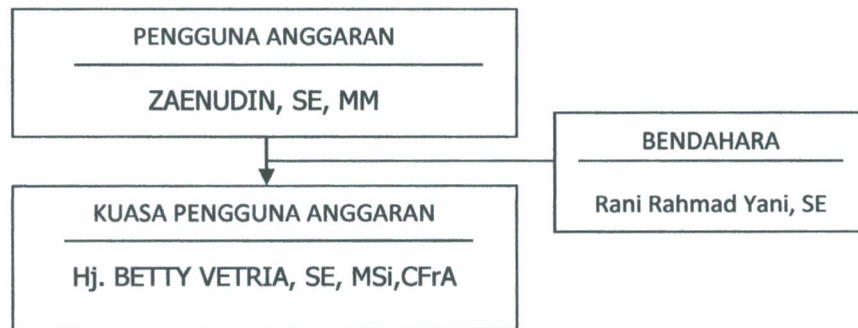
II. SASARAN KEGIATAN :

Reviu Laporan Kinerja atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, asset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada OPD Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 11.820.500
5,1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.820.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.820.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.320.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.320.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 710.500
	[#] Penggandaan Reviu Laporan Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 710.500
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2842 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 710.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 610.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 610.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	44,000	0	Rp. 440.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	10 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	17,000	0	Rp. 170.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.500.000
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.500.000
	[#] Reviu Laporan Kinerja (Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/Staf) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 10 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150,000	0	Rp. 10.500.000
Grand Total :						Rp. 11.820.500



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB KEGIATAN REVIU LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

REVIU LAPORAN KINERJA

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk daerah propinsi dan Bupati/Walikota untuk daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dibantu oleh Inspektorat Daerah. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian , asset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka Reviu Laporan Kinerja	Januari s/d Desember
2.	Reviu Laporan Kinerja	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

1. Laporan hasil reviu yang diterbitkan sebanyak 52 LHR.
2. Meningkatnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 11.820.500,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran


Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	: Reviu Laporan Keuangan
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, SE
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 21.128.100,-

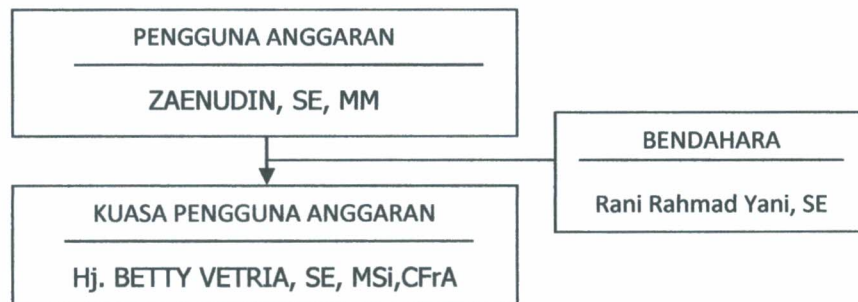
II. SASARAN KEGIATAN :

Reviu Laporan Keuangan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Tertindakannya perbaikan pengelolaan kepegawaian, asset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada OPD Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 21.128.100
5,1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.128.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.128.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.128.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.128.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 603.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 603.500
	[-]					
	brief ordener Spesifikasi : a4	3 Buah	Buah	54,300	0	Rp. 162.900
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	1 Kotak	Kotak Besar	56,800	0	Rp. 56.800
	pena Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	73,300	0	Rp. 73.300
	pensil Spesifikasi : kayu	1 Pack	Pack	45,500	0	Rp. 45.500
	Stapler Spesifikasi : hd 50	10 Buah	Buah	26,500	0	Rp. 265.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.304.600



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB KEGIATAN PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS KABUPATEN/KOTA

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	: Pengawasan Umum dan Teknis
	Kabupaten/Kota
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, SE
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 309.463.650,-

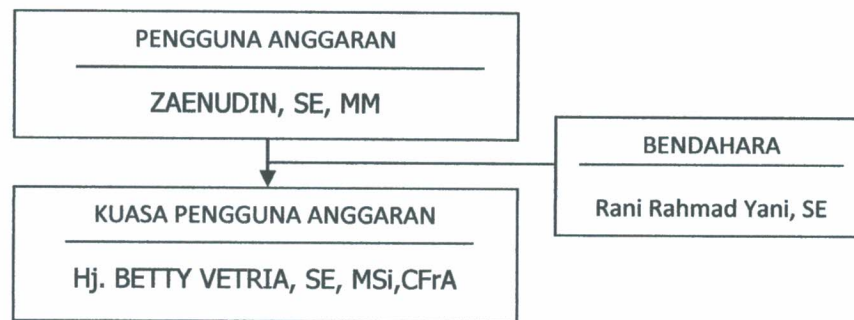
II. SASARAN KEGIATAN :

Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Terlaksananya pengawasan internal secara umum dan teknis terhadap kabupaten/kota.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 309.463.650
5,1	BELANJA OPERASI					Rp. 309.463.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 309.463.650
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.463.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.463.650
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.375.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Review Kinerja dan keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.375.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	500 Liter	Liter	12,750	0	Rp. 6.375.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.279.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 309.463.650
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.610.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	45 Rim	Rim	58,000	0	Rp. 2.610.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.247.250
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.247.250
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	4989 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.247.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.952.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.952.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	8 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	44,000	0	Rp. 1.408.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	8 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	17,000	0	Rp. 544.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 296.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 296.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 296.000.000
	[#] Pengawasan Umum Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 296.000.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbangar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	7 Orang x 7 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650,000	0	Rp. 159.250.000
	Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 10 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	75,000	0	Rp. 3.750.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 10 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380,000	0	Rp. 133.000.000
Grand Total :						Rp. 309.463.650

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk daerah propinsi dan Bupati/Walikota untuk daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dibantu oleh Inspektorat Daerah. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan umum dan teknis terhadap kabupaten/kota lingkup Provinsi Sumatera Barat .

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Belanja barang dan jasa	Januari s/d Desember
2.	Kegiatan pengawasan umum kabupaten/kota	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

1. Laporan hasil pengawasan yang diterbitkan sebanyak 8 laporan
2. Meningkatnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 309.463.650,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran


Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, SE
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 378.884.831,-

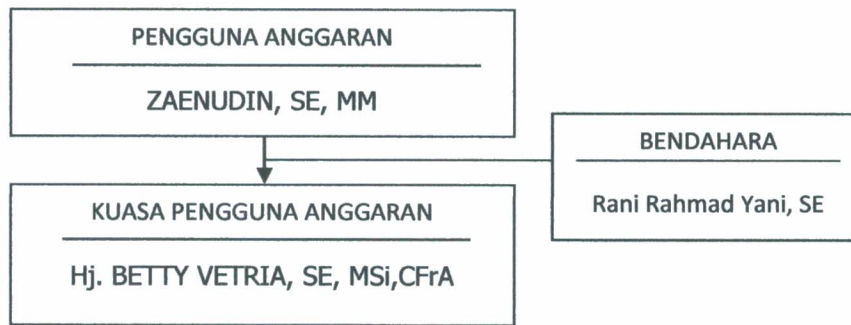
II. SASARAN KEGIATAN :

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dilaksanakan agar terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, asset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada SKPD Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Penyelesaian dan penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 378.884.831
5,1	BELANJA OPERASI					Rp. 378.884.831
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 378.884.831
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 63.662.170
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 63.662.170
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 12.750.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.750.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	1000 Liter	Liter	12,750	0	Rp. 12.750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.460.340
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : snelhecter	50 Pcs	Pcs	17,400	0	Rp. 870.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.062.380
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.062.380
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	34 Rim	Rim	58,000	0	Rp. 378.884.831
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	40 Rim	Rim	51,300	0	Rp. 2.052.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.000.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.764.000

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 32.625.450
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.625.450
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	11 Orang x 2 Hari x 25 Kali	Orang / Kali	44,000	0	Rp. 23.275.450
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	11 Orang x 2 Hari x 25 Kali	Orang / Kali	17,000	0	Rp. 9.350.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 315.222.666
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 315.222.661
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 315.222.661
	[#] Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di dalam Ibukota Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110.000.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	8 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	650,000	0	Rp. 41.600.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950,000	0	Rp. 7.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380,000	0	Rp. 60.800.000
	[#] Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP di luar Ibukota Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110.000.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	8 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	650,000	0	Rp. 41.600.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950,000	0	Rp. 7.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380,000	0	Rp. 60.800.000
	[#] Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat, Itjen Kemendagri terkait dan BPK RI dalam Ibukota Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.722.661
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	150,000	0	Rp. 9.722.661
	[#] Perjalanan dinas terkait penyampaian Monitoring LHP ke Objek Pemeriksaan Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 85.500.000
	[-]					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	5 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	950,000	0	Rp. 47.500.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380,000	0	Rp. 38.000.000
Grand Total :						Rp. 378.884.831

KERANGKA ACUAN KERJA

MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasil guna. Agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasa Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu tindak lanjut secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Penyelesaian dan penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Januari s/d Desember
2.	Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Januari s/d Desember
3.	Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP diluar Ibukota Provinsi	Januari s/d Desember
4.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat, Itjen Kemendagri terkait dan BPK RI dalam Ibukota Provinsi	Januari s/d Desember
5.	Pemutakhiran Data Regional	Januari s/d Desember
6.	Pra Pemutakhiran Data Regional	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

1. Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindak lanjuti.
2. Meningkatnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 378.884.831,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran


Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU SUB KEGIATAN PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu	
Sub Kegiatan	: Penanganan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah	
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, SE
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp40.335.000,-

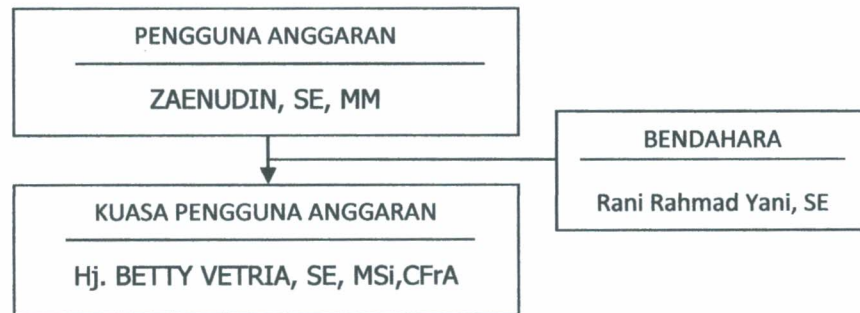
II. SASARAN KEGIATAN :

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan agar terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, asset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada SKPD Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Penyelesaian dan penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 40.335.000
5,1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.335.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.335.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.495.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.495.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.825.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.825.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	300 Liter	Liter	12,750	0	Rp. 3.825.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.250.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.250.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.420.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : c13s0155156	25 Unit / Tahun	Unit	56,800	0	Rp. 1.420.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.840.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.840.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 33.840.000
	[#] Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) penanganan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.840.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	8 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650,000	0	Rp. 15.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380,000	0	Rp. 18.240.000
Grand Total :						Rp. 40.335.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasil guna. Agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasa Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu tindak lanjut secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Penyelesaian dan penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Januari s/d Desember
3.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

1 (satu) Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 40.335.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU SUB KEGIATAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu	
Sub Kegiatan	: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, SE
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 212.034.100,-

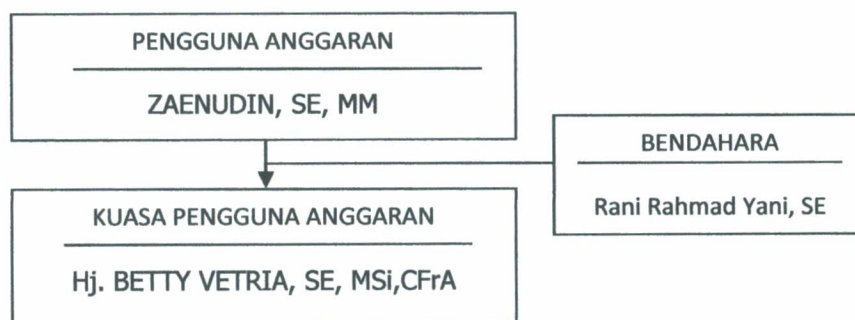
II. SASARAN KEGIATAN :

Pengawasan dengan tujuan tertentu ditujukan untuk penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi penyalahgunaan kewenangan, hambatan dan pelayanan dalam masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin pegawai.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus/khusus dilingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Barat.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 212.034.100
5,1	BELANJA OPERASI					Rp. 212.034.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 212.034.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.634.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.634.100
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.482.500
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.482.500
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	430 Liter	Liter	12,750	0	Rp. 5.482.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.159.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.186.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.186.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	20 Rim	Rim	58,000	0	Rp. 1.160.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	51,300	0	Rp. 1.026.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.670.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.670.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	6680 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.670.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.136.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.136.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : c13s0155156	20 Unit	Unit	56,800	0	Rp. 1.136.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 200.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 200.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 200.400.000
	[#] Pemeriksaan Tertentu/Pengaduan Masyarakat lainnya di luar Ibukota Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 144.000.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	3 Orang x 2 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	650,000	0	Rp. 58.500.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 5 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	380,000	0	Rp. 85.500.000
	[#] Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa Diluar Ibukota Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 56.400.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	4 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	650,000	0	Rp. 26.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380,000	0	Rp. 30.400.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

A. LATAR BELAKANG

Pengaduan Masyarakat merupakan laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penanganan pengaduan masyarakat meliputi : penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin pegawai. Pemeriksaan kasus/khusus bersumber dari pengaduan masyarakat, dan kasus yang diangkat dari hasil pemeriksaan reguler. Pemeriksaan kasus/khusus berupa pelanggaran terhadap PP No.53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, PP No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2006.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus/khusus dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Januari s/d Desember
2.	Pemeriksaan Probity Audit ke Kabupaten/Kota	Januari s/d Desember
3.	Pemeriksaan Tertentu/ Pengaduan Masyarakat lainnya di luar Ibukota Provinsi	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

1. Laporan Hasil Pemeriksaan kasus/khusus
2. Terlaksananya penanganan/ penyelesaian kasus/khusus pengaduan masyarakat.

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 212.034.100,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN SUB KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi	
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
Sub Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan	
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 8.245.400,-

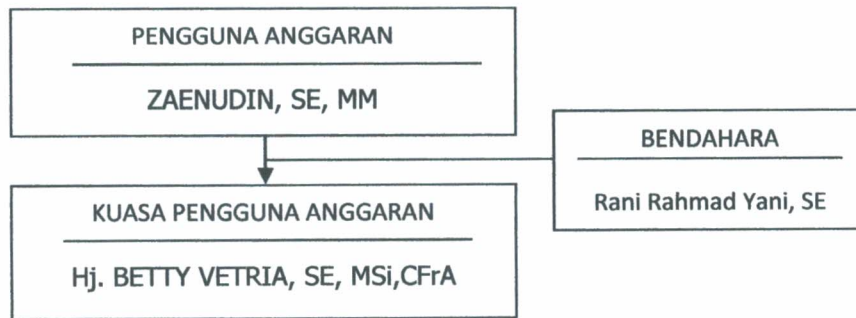
II. SASARAN KEGIATAN :

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan maksud terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan dengan penyusunan regulasi tentang pengawasan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Meningkatkan sistem pengawasan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sehingga tercapai efektifitas dalam penggunaan anggaran yang mendukung visi misi yang telah ditetapkan.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.245.400
5,1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.245.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.245.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.245.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.245.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.040.000
	[#] Bahan Bakar Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.040.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	160 Liter	Liter	12,750	0	Rp. 2.040.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 476.400

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.772.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.772.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	7088 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.772.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 899.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 899.000
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : c13t774100	2 Unit	Unit	222,300	0	Rp. 444.600
	Tinta Printer Spesifikasi : c13s0155156	8 Unit	Unit	56,800	0	Rp. 454.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.058.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.013.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	11 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	44,000	0	Rp. 1.452.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	11 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	17,000	0	Rp. 561.000
	[#] Konsumsi Rapat-rapat Internal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.045.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	11 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	17,000	0	Rp. 561.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	11 Orang / Kali	Orang / Kali	44,000	0	Rp. 484.000
Grand Total :						Rp. 8.245.400

KERANGKA ACUAN KERJA

PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan Pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan Program Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Meningkatkan sistem pengawasan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sehingga tercapai efektifitas dalam penggunaan anggaran yang mendukung visi misi yang telah ditetapkan.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Januari s/d Desember
2.	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan	Januari s/d Desember
3.	Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan dalam Ibukota Propinsi	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan yang di rumuskan 5 Peraturan

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 8.245.400,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan Program	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Sub Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFrA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, S.E.
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 286.590.286,-

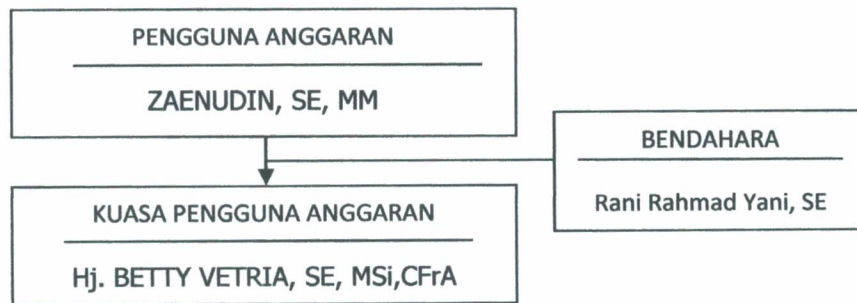
II. SASARAN KEGIATAN :

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan maksud mensinkronkan program kerja pengawasan supaya tidak terjadi overlapping pemeriksaan baik itu ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Mensinkronkan dan mensinergiskan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Tingkat Pusat dan di Kabupaten/ Kota.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 286.590.286
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 286.590.286
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 286.590.286
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.356.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.356.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 10.200.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.200.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	800 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 10.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.912.000
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	486.300	0	Rp. 972.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 290.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 290.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 290.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.000.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 170.400

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.784.000
	[#] Konsumsi Rapat Internal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.784.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	8 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 2.448.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	8 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 6.336.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 13.900.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.900.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	2 Orang x 6 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 10.800.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 246.333.886
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 246.333.886
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 246.333.886
	[#] Perjalanan dinas memfasilitasi PKPT ke Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 102.693.886
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	6 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 47.973.886
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 54.720.000
	[#] Perjalanan dinas terkait penyusunan kebijakan Teknis bidang Fasilitas Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 143.640.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	7 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp. 79.800.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 63.840.000
Grand Total :						Rp. 286.590.286

KERANGKA ACUAN KERJA

PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2022 maka Program Kerja Pengawasan Tahunan di koordinasikan dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Mensinkronkan dan mensinergikan program kerja pengawasan di Tingkat Pusat dan di Kabupaten/Kota.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Januari s/d Desember
2.	Fasilitasi PKPT ke Kabupaten/Kota	Januari s/d Desember
3.	Penyusunan dokumen kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 1 Dokumen

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 286.590.286,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi	
Kegiatan	: Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan	: Pendampingan dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah	
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, SE
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 80.070.950,-

II. SASARAN KEGIATAN :

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan pendampingan Sistem Pengendalian Intern lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mencapai hasil Evaluasi SPI yang memadai.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya OPD yang memperoleh hasil SPI yang memadai
2. Meningkatnya maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

[illegible]

KERANGKA ACUAN KERJA

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Menurut PP nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat lima unsur yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Inspektorat berperan aktif dalam mendampingi OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat agar dapat mencapai hasil evaluasi SPI yang memadai dalam rangka mencapai level maturitas SPIP yang ditargetkan.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya OPD yang memperoleh hasil SPI yang memadai
2. Meningkatnya maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pelaksanaan Evaluasi SPIP	Januari s/d Desember
2.	Rapat rapat dalam rangka kegiatan penilaian maturitas SPIP	Januari s/d Desember
3.	Bimtek SPIP terintegrasi	Januari s/d Desember
4.	Workshop penyelenggaraan SPIP terintegrasi	Januari s/d Desember
5.	Pemantauan dan penilaian maturitas SPIP	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang diterbitkan
1 Laporan .

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 80.070.950,-
melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran


Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN,ASISTENSI,VERIFIKASI DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi	
Kegiatan	: Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan	: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan
Penilaian Reformasi Birokrasi	
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSI, CFrA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, SE
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 58.974.000,-

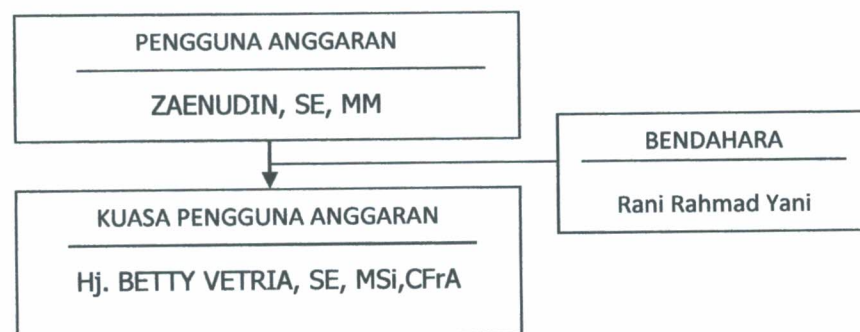
II. SASARAN KEGIATAN :

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB No.1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permen Pan dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Reformasi secara online dan Permen Pan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
2. Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Kementerian PAN dan RB
3. Untuk memfasilitasi bench learning (saling belajar dan tukar pengalaman) mengenai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi antar instansi pemerintah.
4. Bagi instansi pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (self assesment) atas pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi masing-masing.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 58.974.000
5,1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.974.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.974.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.834.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.834.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.100.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.100.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	400 Liter	Liter	12,750	0	Rp. 5.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 870.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 870.000
	[-]					
	Map Spesifikasi : snelhecter	50 Pcs	Pcs	17,400	0	Rp. 870.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 750.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 750.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.634.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.634.000
	[-]					
	Bubuk Toner Spesifikasi : 2500	2 Buah	Buah	286,000	0	Rp. 572.000
	catridge printer Spesifikasi : cart 46 colour	1 Unit	Unit	155,000	0	Rp. 155.000
	catridge printer Spesifikasi : 746	1 Unit	Unit	339,000	0	Rp. 339.000
	Tinta Printer Spesifikasi : c13s0155156	10 Unit	Unit	56,800	0	Rp. 568.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.320.000
	[#] Belanja Makan Minum rapat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.320.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Kali	44,000	0	Rp. 5.280.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Kali	17,000	0	Rp. 2.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.300.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.300.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Kegiatan	700,000	0	Rp. 700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	2 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	900,000	0	Rp. 7.200.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	400,000	0	Rp. 400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.840.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.840.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 33.840.000
	[#] Pembinaan dan Monitoring Evaluasi PMPRB Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.840.000
	Grand Total :					Rp. 58.974.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Permen PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permen PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Reformasi secara online dan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
2. Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Kementerian PAN dan RB
3. Untuk memfasilitasi bench learning (saling belajar dan tukar pengalaman) mengenai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi antar instansi pemerintah.
4. Bagi instansi pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (self assesment) atas pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi masing-masing.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka Pendampingan,Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Birokrasi	Januari s/d Desember
2.	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi PMPRB Kabupaten/Kota	Januari s/d Desember
3.	Kegiatan pendampingan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Laporan Pendampingan,Asistensi,Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterbitkan 1 Laporan .

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 58.974.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI SUB KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan	: Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan	: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, SE
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 134.988.200

II. SASARAN KEGIATAN :

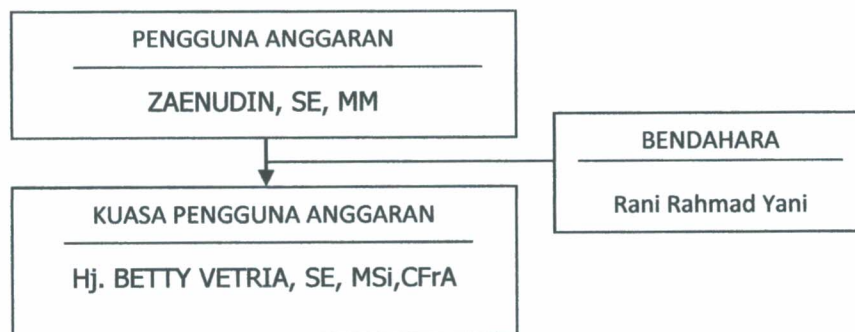
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan agar setiap Instansi Pemerintah dapat memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat membangun system dan infrastruktur untuk mengimplementasikan SPIP
2. Terumuskannya strategi dan perencanaan yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait implementasi penilaian resiko.
3. Salah satu bentuk upaya memotivasi SKPD untuk menerapkan PP Nomor 60 Tahun 2008, Perpres Nomor 52 Tahun 2012 dan PerGub Nomor 40 Tahun 2009

4. Menumbuhkan kesadaran untuk menolak gratifikasi dan mampu untuk mengevaluasi pelaksanaan/implementasi pengendalian gratifikasi pada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Membangun Sistem Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 134.988.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 134.988.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 134.988.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.808.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.808.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.650.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.825.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	300 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 3.825.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Pencegahan Korupsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.825.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	300 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 3.825.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.236.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pencegahan Korupsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.689.800
	[-]					
	Box file Spesifikasi : folio	20 Pcs	Pcs	13.900	0	Rp. 278.000
	brief ordener Spesifikasi : a4	26 Buah	Buah	54.300	0	Rp. 1.411.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.208.100
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.509.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pencegahan Korupsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.480.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 3.480.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pengendalian Gratifikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 218.600
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	2 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 116.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	2 Rim	Rim	51.300	0	Rp. 102.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.505.500
	[#] Belanja Penggandaan Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Penggandaan Pencegahan Korupsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.016.250
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8065 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.016.250
	[#] Belanja Penggandaan Pengendalian Gratifikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.539.250
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	6157 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.539.250
	[#] Rapat Koordinasi Sapu Bersih Pungutan Liar se Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 450.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	10 Meter x 1 Buah	M2	45.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.385.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 568.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pembinaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 568.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : c13s0155156	10 Unit	Unit	56,800	0	Rp. 568.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.050.000
	[#] Makan Minum Rapat Pembinaan Zona Integritas WBK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.830.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	44,000	0	Rp. 1.320.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	10 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	17,000	0	Rp. 510.000
	[#] Makan Minum Rapat Pengelolaan LHKPN dan LHKASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.220.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	44,000	0	Rp. 880.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	10 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	17,000	0	Rp. 340.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 39.480.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 39.480.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 39.480.000
	[#] Pembinaan Zona Integritas WBK ke luar Ibukota Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.560.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	8 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650,000	0	Rp. 10.400.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380,000	0	Rp. 12.160.000
	[#] Sosialisasi dan Pembinaan LHKPN/LHKASN ke luar Ibukota Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.920.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	6 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650,000	0	Rp. 7.800.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380,000	0	Rp. 9.120.000
Grand Total :						Rp. 50.175.000

KERANGKA ACUAN KERJA

PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS

A. LATAR BELAKANG

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dilakukan berdasarkan Permenpan No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai kerja dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK.
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Januari s/d Desember
2.	Pelatihan Koordinator Tim Survey Penilaian Integritas ke Pusat	Januari s/d Desember
3.	Pembinaan Zona Integritas WBK	Januari s/d Desember
4.	Pembinaan LHKPN dan LHKASN	Januari s/d Desember
5.	Pencacahan dan Supervisi lapangan serta penyusunan laporan survei penilaian integritas	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

1. Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang diterbitkan 2 Laporan .

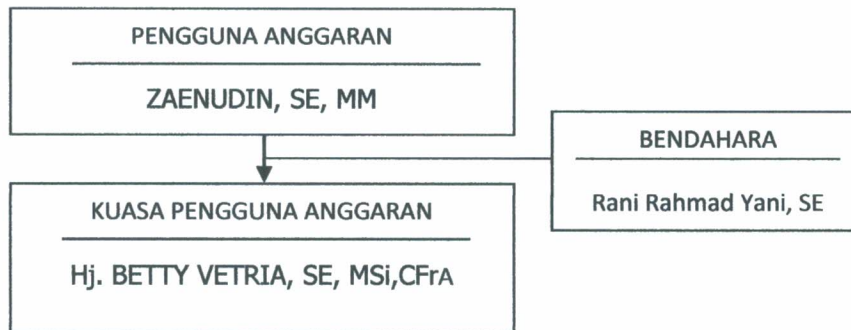
F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 50.175.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran


Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 80.070.950
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.070.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.070.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.270.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.270.950
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.912.500
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.912.500
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	150 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 1.912.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.689.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Evaluasi SPIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.689.800
	[-]					
	Box file Spesifikasi : folio	20 Pcs	Pcs	13.900	0	Rp. 278.000
	brief ordener Spesifikasi : a4	26 Buah	Buah	54.300	0	Rp. 1.411.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.480.000

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.823.000
	#] Belanja Makan Minum Persiapan Supervisi Pencegahan Korupsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.575.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	5 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 1.275.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	5 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 3.300.000
	#] Belanja Makan Minum rapat Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.150.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 6.600.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 2.550.000
	#] Makan Minum Rapat Pengendalian Gratifikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.098.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	6 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 792.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	6 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 306.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.100.000
	#] Rapat Koordinasi Sapu Bersih Pungutan Liar se Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.100.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 82.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 82.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 82.080.000
	#] Monitoring dan Evaluasi MCP KPK ke Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.200.000
	[-]					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	5 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp. 19.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 15.200.000
	#] Pemeriksaan unit Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Kabupaten/Kota (Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/staf) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.880.000
	[-]					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp. 26.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 21.280.000
Grand Total :						Rp. 134.988.200

KERANGKA ACUAN KERJA

KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Perpres No. 52 Tahun 2012 tentang Pencegahan Korupsi merupakan suatu hal mutlak yang perlu dibangun dan dilaksanakan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penyelenggaraan Evaluasi SPIP dan pencegahan korupsi agar setiap instansi pemerintahan dapat memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance) bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara.

Pengendalian gratifikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 87 Tahun 2014 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Inpres No. 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana dan prasarana baik yang berada di pemerintahan daerah.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat membangun system dan infrastruktur untuk mengimplementasikan SPIP
2. Terumuskannya strategi dan perencanaan yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait implementasi penilaian resiko.
3. Salah satu bentuk upaya memotivasi SKPD untuk menerapkan PP Nomor 60 Tahun 2008, Perpres Nomor 52 Tahun 2012 dan PerGub Nomor 40 Tahun 2009
4. Menumbuhkan kesadaran untuk menolak gratifikasi dan mampu untuk mengevaluasi pelaksanaan/implementasi pengendalian gratifikasi pada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

5. Membangun Sistem Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D. METODE PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Kegiatan rapat-rapat dalam rangka Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Januari s/d Desember
2.	Monitoring dan evaluasi MCP KPK	Januari s/d Desember
3.	Pembinaan Gratifikasi dalam dan di luar Ibukota Provinsi	Januari s/d Desember
4.	Pelaksanaan kegiatan Saber Pungli	Januari s/d Desember

E. KELUARAN

Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan sebanyak 1 Laporan .

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 134.988.200,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, Oktober 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



HJ. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL

I. UMUM

A. DATA-DATA :

Nama SKPD	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program	: Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi	
Kegiatan	: Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan	: Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas	
Lokasi Kegiatan	: Padang

B. PENGGUNA ANGGARAN (PA) :

Nama	: ZAENUDIN, SE, MM
Jabatan	: Inspektur
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

Nama	: Hj. BETTY VETRIA, SE, MSi, CFA
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

D. BENDAHARAWAN :

Nama	: RANI RAHMAD YANI, A.Md
Alamat	: Jln. Nipah No. 51 Padang

E. TANGGAL PENERBITAN RKA : Oktober 2022

F. JUMLAH DANA : Rp. 50.175.000

II. SASARAN KEGIATAN :

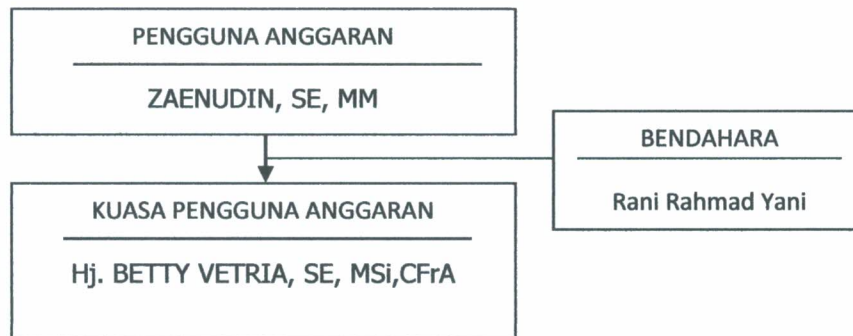
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penegakan Integritas dilakukan berdasarkan Permenpan No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai kerja dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK.

3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

III. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



IV. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.175.000
5,1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.175.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.175.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.695.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.695.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.550.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak LHKPN dan LHKASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.275.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	100 Liter	Liter	12,750	0	Rp. 1.275.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Pembinaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.275.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	100 Liter	Liter	12,750	0	Rp. 1.275.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 315.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pembinaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 315.000
	[-]					
	Map Spesifikasi : spring	50 Pcs	Pcs	6,300	0	Rp. 315.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.212.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	51,300	Rp 1617,000	Rp. 1.026.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pengelolaan LHKPN dan LHKASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.160.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	20 Rim	Rim	58,000	0	Rp. 1.160.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	51,300	0	Rp. 1.026.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Penggandaan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000